Pemerintah Kota Bontang
2020-2029

MASTERPLAN SMART CITY

Rencana Pembangunan Kota Bontang
2020-2029

Buku 2

Pemerintah Kota Bontang
2020-2029

MASTERPLAN SMART CITY

Rencana Pembangunan Kota Bontang 2020-2029

Buku 2

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG

Dalam dua dasawarsa terakhir, perubahan ekosistem ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh disrupsi digital telah dirasakan oleh semua institusi, tak terkecuali pada birokrasi pemerintah daerah. Termasuk diantaranya Pemerintah Kota Bontang. Dengan karakteristik masyarakat yang multi-kultur, urban-maritim, dan sudah berpuluh-puluh tahun menyatu dalam ekosistem ekonomi industri yang matang, masyarakat Kota Bontang memiliki harapan yang tinggi terhadap kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Pembangunan perkotaan termasuk pelayanan publik berbasis konsep Smart City telah menjadi tren di berbagai belahan dunia dalam lima tahun terakhir. Tengok saja pembangunan kota modern seperti Tokyo, Melbourne, London, Barcelona, Seoul, Singapura dan masih banyak lagi. Kota-kota tersebut telah memadukan konsep pembangunan dan pelayanan publik yang *high-tech* (digital) berbasis Smart City dengan melibatkan komunitas hinga komitmen terhadap pemeliharaan lingkungan.

Belajar dari tren pembangunan Smart City di negara lain, Kota Bontang akan terus mewujudkan kemajuan ekonomi dan sosial bagi warganya. Termasuk memberikan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan nyaman. Pada tahun 2019, kota Bontang telah resmi dipilih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City bersama dengan 99 kota dan kabupaten yang lain. Kota Bontang telah berhasil menyusun Masterplan Smart City tahun 2020-2029. Visi yang ingin dicapai dalam 10 tahun kedepan adalah ***"Mewujudkan masyarakat Bontang yang sejahtera dan humanis melalui inovasi yang berkelanjutan"***. Visi ini harus didukung oleh segenap OPD dan *stakeholder* lain agar cita-cita Bontang Smart City dapat tercapai pada waktu yang ditentukan.

Bontang, 25 Oktober 2019

Walikota Bontang

dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG

SAMBUTAN KETUA TIM PELAKSANA SMART CITY

Kota Bontang telah berkomitmen untuk mengadopsi konsep pembangunan Smart City sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai langkah awal, Kota Bontang telah menyusun Masterplan Bontang Smart City Tahun 2020-2029 melalui pendampingan Kementerian Kominfo. Masterplan ini merupakan acuan wajib bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan pembangunan Bontang Smart City dalam jangka pendek (2020), jangka menengah (2021-2024), dan jangka panjang (2025-2029).

Visi pembangunan smart city Kota Bontang adalah ***"Mewujudkan masyarakat Bontang yang sejahtera dan humanis melalui inovasi yang berkelanjutan.***" Sejahtera berarti terpenuhinya hak-hak penduduk Bontang. Humanis berarti mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sumber daya manusia yang mandiri dan berbudaya lokal. Inovasi berarti mendorong percepatan pembangunan Kota Bontang melalui inovasi dan kreativitas baik oleh penyelenggara birokrasi maupun oleh masyarakat, dunia pendidikan, dan swasta.

Untuk mendukung target pembangunan Bontang Smart City akan dicapai dengan memperkuat kesiapan daya dukung dan daya dorong yang akan memperkuat ekosistem smart city. Diantaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK, infrastruktur fisik dan sosial, pengembangan aplikasi, penguatan regulasi pendukung pelaksanaan Bontang Smart City, penguatan SDM aparatur dan masyarakat hingga peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan.

Indikator pencapaian pembangunan Bontang Smart City disusun berdasarkan enam dimensi smart city berdasarkan buku panduan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keenam dimensi tersebut adalah tata kelola pemerintahan pintar (*smart governance*), pemasaran daerah pintar (*smart branding*), pengembangan ekonomi pintar (*smart economy*), mewujudkan kehidupan pintar (*smart living*), mewujudkan masyarakat pintar (*smart society*), dan pembangunan lingkungan pintar (*smart environment*). Dengan demikian sinergi antara birokrasi yang efisien, iklim usaha yang mendukung, dan masyarakat yang nyaman dan sejahtera akan terwujud di lingkungan Kota Bontang.

Bontang, 25 Oktober 2019
Ketua Tim Pelaksana Smart City

Ir. AMIRUDIN, M.P

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG 2

SAMBUTAN KETUA TIM PELAKSANA SMART CITY 4

BAB I PENDAHULUAN 8

A. Latar Belakang 10

B. Maksud dan Tujuan Masterplan 12

C. Landasan Hukum 13

D. Kerangka Pikir Smart City 21

1. Smart Governance 23

2. Smart Branding 24

3. Smart Economy 25

4. Smart Living 26

5. Smart Society 27

6. Smart Environment 28

BAB II VISI MISI dan SASARAN SMART CITY KOTA BONTANG 30

A. Visi Smart City 30

B. Misi Smart City Kota Bontang 30

C. Sasaran Smart City 31

1. Smart Governance 31

2. Smart Branding 32

3. Smart Ekonomi 33

4. Smart Living 33

5. Smart Society 34

6. Smart Environment 35

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY 37

1. Smart Governance 38

1.1 Ekosistem Smart Governance 40

2. Smart Branding 41

2.1 Ekosistem Smart Branding 42

3. Smart Economy 44

3.1 Ekosistem Smart Economy 45

4. Smart Living 46

4.1 Ekosistem Smart Living 47

5. Smart Society 48

5.1 Ekosistem Smart Society 50

6. Smart Environment 51

6.1 Ekosistem Smart Environtment 53

BAB IV RENCANA AKSI KESIAPAN SMART CITY 55

A. Rencana Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City 55

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung Smart City 56

1. Infrastruktur Digital 56

2. Infrastruktur Fisik 56

3. Infrastruktur Sosial 57

C. Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City57

D. Rencana Penguatan SDM Melalui Literasi Smart City 58

BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY 59

A. Peta Program Kesiapan Smart City 62

1. Membangun Kesiapan Smart City Kota Bontang 62

2. Membangun Smart City Kota Bontang 66

B. Kertas Kerja Program Kesiapan Smart City 85

1. Rencana Pembangunan Suprastruktur Pendukung *Smart City*. 85

2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*. 87
3. Rencana Pembangunan Aplikasi Pendukung *Smart City*..... 89
4. Rencana Pembangunan Literasi Pendukung *Smart City*..... 91
C. Kertas Kerja Pembangunan Smart City 94
1. Smart Governance..... 94
2. Smart Branding..... 101
3. Smart Economy 111
4. Smart Living..... 119
5. Smart Society..... 123
6. Smart Environment 126
BAB VI PENUTUP..... 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Elemen *smart city readiness* 22
Gambar 2. Enam Dimensi Smart City 23
Gambar 3. Dimensi *Smart Governance* 24
Gambar 4. Dimensi *Smart Branding* 25
Gambar 5. Dimensi *Smart Economy* 26
Gambar 6. Dimensi *Smart Living* 27
Gambar 7. Dimensi *Smart Society* 28
Gambar 8. Dimensi *Smart Environment* 29
Gambar 9. Arsitektur *Smart City.* 37
Gambar 10. Ekosistem *Smart Governance* 40
Gambar 11. Ekosistem *Smart Branding* 42
Gambar 12. Ekosistem *Smart Economy* 45
Gambar 13. Ekosistem *Smart Living* 47
Gambar 14. Ekosistem *Smart Society* 50
Gambar 15. Ekosistem *Smart Environtment* 53
Gambar 16. Roadmap Pembangunan Smart City Kota Bontang 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Roadmap Kesiapan Smart City 62
Tabel 2. Roadmap Smart City Kota Bontang 66
Tabel 3. Kertas Kerja Suprastruktur 85
Tabel 4. Kertas Kerja Infrastruktur 87
Tabel 5. Kertas Kerja Aplikasi 89
Tabel 6. Kertas Kerja Literasi 91
Tabel 7. Kertas Kerja Smart Governance 94
Tabel 8. Kertas Kerja Smart Branding 101
Tabel 9. Kertas Kerja Smart Economy 111
Tabel 10. Kertas Kerja Smart Living 119
Tabel 11. Kertas Kerja Smart Society 123
Tabel 12. Kertas Kerja Smart Environment 126

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju pesat pada era digital saat ini bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, inovasi-inovasi baru terus bermunculan dari seluruh penjuru dunia. Hal tersebut telah mempengaruhi aktifitas organisasi dan institusi, tidak terkecuali pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kota Bontang harus terus termotivasi untuk berinovasi dan turut berkembang mengikuti kemajuan dunia serta siap bersaing dengan daerah - daerah lainnya. Mewujudkan Bontang Smart City di era digital saat ini harus menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi birokrasi dan masyarakat demi mewujudkan kemajuan daerah yang sejalan dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan daya saing dengan kota-kota lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa ide inovasi dapat dilakukan untuk mewujudkan kota pintar diantaranya pada aspek perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Inovasi pelayanan publik perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital di era distruptif. Pada saat yang sama, birokrasi dan masyarakat harus diedukasi melalui program literasi agar adaptif dan terbiasa dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian baik birokrasi dan masyarakat akan merasa mudah dan nyaman dalam menjalankan pekerjaan dan mendapatkan manfaat atas inovasi tersebut. Melalui inovasi yang berkelanjutan, Kota Bontang akan terus berbenah secara terus menerus menjadi kota yang maju, sejahtera, nyaman, dan aman bagi warganya.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama yang menjadi *driver* dalam dalam mewujudkan Bontang Smart City. Beberapa sarana pendukung seperti infrastruktur teknologi digital, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan smart city Kota Bontang yang berkelanjutan. Hanya dengan infrastruktur yang baik, Kota Bontang akan memiliki kesiapan menerapkan

pembangunan smart city secara ideal. Dengan demikian Kota Bontang akan dapat melakukan akselerasi pembangunan smart city untuk semua dimensi secara lebih mudah dan lebih cepat.

Konsep pembangunan smart city juga sebagai antisipasi atas beragam dinamika yang akan terjadi di masa depan, baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau untuk mengembangkan potensi daerah melalui penggunaan teknologi informasi. Smart city diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kota yang bersifat komprehensif, inklusif, efektif dan efisien.

Konsep pembangunan smart city atau pembangunan kota pintar telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di berbagai penjuru dunia saat ini. Pembangunan smart city tidak hanya mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi melainkan juga berfokus pada bagaimana membangun kota atau daerah dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler untuk mewujudkan kota atau daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penekanan pembangunan smart city adalah pentingnya sebuah inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan berbagai pemasalahan pembangunan.

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas, Kemen PUPR, dan Kantor Staf Presiden menginisiasi Gerakan Menuju 100 Smart City. Gerakan ini diawali dengan pemilihan 25 kabupaten/kota yang didampingi oleh para ahli untuk menyusun dan mengimplementasikan konsep smart city pada tahun 2017. Pada tahun 2018 telah dipilih 50 kabupaten/kota dan 25 kabupaten/kota pada tahun 2019.

Pada kegiatan *assessment* daerah dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City tahun 2019, Kemenkominfo telah menunjuk Kota Bontang sebagai salah satu daerah yang layak untuk dilibatkan dalam program smart city ini . Kota Bontang didampingi oleh tenaga ahli Kemenkominfo dalam menyusun perencanaan dan implementasi *Bontang Smart City* 2020-2029. Pelaksanaan program ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kemenkominfo pada tahun 2020.

Rencana pembangunan *Bontang Smart City* atau Bontang Kota Pintar diwujudkan dalam buku "Masterplan Bontang Smart City" yang mengacu pada buku panduan yang telah disiapkan oleh Kemenkominfo. Pengembangan Bontang Kota Pintar harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada, menyelesaikan masalah, mendorong kemajuan, dan meningkatkan daya saing Kota Bontang. Masterplan *smart city* Kota Bontang diharapkan menjadi salah satu wujud inovasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

B. Maksud dan Tujuan Masterplan

Penyusunan masterplan *smart city* Kota Bontang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan Kota Bontang menjadi kota pintar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, mulai tahun 2020 hingga 2029. Terutama bagaimana *smart city* dapat memanfaatkan potensi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan di lingkungan Kota Bontang.

Masterplan *smart city* Kota Bontang dimaksudkan untuk menjadi sebuah pedoman dalam menjalani setiap siklus rencana dan transformasi pembangunan Kota Bontang menjadi kota pintar. Masterplan *smart city* Kota Bontang ini merupakan panduan bagi segenap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan *Bontang Smart City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Manfaat yang ingin diraih dalam penyusunan masterplan *smart city* Kota Bontang adalah:

1. Meningkatkan kesiapan pembangunan *Smart City* Kota Bontang (*Smart City readiness)*;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Bontang dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*smart governance)*;
3. Meningkatkan daya saing Kota Bontang melalui *Smart City* branding (*Smart City branding)*;
4. Meningkatkan produktivitas ekonomi Kota Bontang dengan memanfaatkan teknologi (*smart economy)*
5. Menjamin kelayakan hidup masyarakat Kota Bontang (*smart living)*

6. Mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual (*smart society)*
7. Mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang peduli terhadap tata kelola lingkungan (*smart environment).*

C. Landasan Hukum

1. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika.**

Instruksi presiden Republik Indonesia ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan telematika yang merupakan peluang serta harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Terdapat 3 (tiga) instruksi yang harus dipenuhi oleh pejabat negara dan daerah yaitu pertama, melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dengan berpedoman pada kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Kedua, memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Ketiga, kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI).

2. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.**

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 ini dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat sehingga dengan adanya teknologi komunikasi akan memudahkan dalam melakukan pengembangan terhadap *e-government.*

3. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.**

Peraturan menteri ini dibuat berdasarkan latar belakang bahwa pemanfaatan sistem perkantoran elektronis menyebabkan suatu instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai fasilitator utama untuk melancarkan dan mendukung semua kegiatan antara instansi pemerintah dan masyarakat.

4. **Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003.**

Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah merupakan panduan yang dibuat dalam rangka penerapan *e-government* menuju *good governance* yang harus ditetapkan oleh setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah. Panduan ini menjelaskan tentang model pembangunan infrastruktur portal pemerintah sebagai landasan bagi penerapan *e-government*. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah. Berdasarkan buku panduan ini, aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan infrastruktur portal pemerintah yaitu arah pengembangan infrastruktur informasi elektronik secara keseluruhan, arah pengembangan jasa layanan publik secara keseluruhan dan arah pengembangan jenis layanan publik serta mitra dalam pembangunan dan pengoperasiannya. hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor strategis lainnya.

5. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Undang - undang ini diperuntukkan untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara sehingga perlunya ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

6. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi *e-government.***

Aplikasi *e-Government* adalah susunan piranti lunak yang dirancang dan dibangun untuk mendukung proses layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna akhir (*end user*), yaitu petugas instansi pemerintah maupun publik. Aplikasi *e-Government* dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *back office* dan *front office*. *Back office* adalah aplikasi *e Government* yang tidak langsung menyediakan layanan untuk publik. Aplikasi *back office* lebih banyak menangani keperluan internal dari instansi pemerintah. Jenis aplikasi *back office* dapat pula menangani masalah administrasi yang berkaitan erat dengan layanan publik. Sedangkan *front office* adalah aplikasi yang secara langsung menyediakan layanan untuk publik.

7. **Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan dan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penataan ruang yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

8. **Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi untuk transaksi elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin. Hal ini sebagai perwujudan dari pemerintah dalam menjalankan konsep kota pintar.

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

10. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menciptakan kepastian hukum. Penyelenggaran pelayanan publik berasaskan 12 landasan berupa: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, persamaan perlakuan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, serta kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari 2(Dua) pelayanan yaitu pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Ruang lingkup meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan

sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor strategis lainnya.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan ini berisikan tentang ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang; dan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Rancangan standar pelayanan terdiri dari 14 komponen yaitu dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi Pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

13. **Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika**

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional. Kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

14. **Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman nomenkelatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika**

Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk dinas, bidang dan seksi. Perangkat daerah tersebut diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Perangkat daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan perangkat daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil. Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi.

15. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Undang-undang bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam menetapkan perangkat daerah. Asas pembentukan perangkat daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan

pemerintah dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

16. Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2017 Gerakan Menuju 100 *Smart City*

Buku panduan penyusunan masterplan *smart city* 2017 gerakan menuju 100 *smart city* merupakan buku panduan yang berisikan tata cara penulisan dan isi konten masterplan *smart city* yang terdiri dari analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan *smart city* daerah, analisis kesenjangan strategis daerah, analisis visi *smart city* daerah, analisis strategi pembangunan *smart city* analisis kebutuhan infrastruktur pendukung *smart city* serta analisis kebutuhan aplikasi dan piranti lunak pendukung *smart city*. Selanjutnya buku panduan masterplan *smart city* juga berisikan tentang tata cara penetapan regulasi *smart city*, panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan *smart city* dan juga jadwal kegiatan pendampingan gerakan 100 *smart city* nasional. Adapun tujuan buku panduan *smart city* ini berfungsi agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan *smart city* di tingkat pusat dan daerah serta menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMN dalam dokumen perencanaan *smart city* daerah. Kriteria masterplan *smart city* yang dibuat seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah;
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal
3. Objektif, tepat sasaran dan tepat guna
4. Berkesinambungan dalam menjaga kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah digunakan sebagai elevator internal dan elevator eksternal.

18. Peraturan Presiden Tahun No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan dari adanya SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpaduSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

19. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kepala Daerah Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Gerakan Menuju 100 Smart City

Sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat didalam mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis *smart city*, Kemkominfo telah menggulirkan "Gerakan Menuju 100 *Smart City*" sejak tahun 2017. Kemkominfo telah menandatangani MoU dengan 100 kepala daerah yang terdiri atas 25 kota/kabupaten pada tahun 2017, 50 kota/kabupaten pada tahun 2018, dan 25 kota/kabupaten pada tahun 2019. Termasuk diantaranya dengan Pemerintah Kota Bontang.

D. Kerangka Pikir Smart City

Pembuatan masterplan kota pintar diawali dengan analisis terhadap tiga (3) kondisi yaitu visi pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah dan kondisi daerah saat ini. Visi pembangunan daerah dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji tujuan pembangunan daerah yang tercantum pada RPJPD dan RPJMD Kota Bontang. Kemudian setelah menganalisis ketiga kondisi tersebut selanjutnya disimpulkan tujuan dan tingkat kesiapan *Smart City* yang ada di Kota Bontang.

Analisis Kesiapan Smart City (Smart City Readiness)

Kesiapan *Smart City* yang ada di Kota Bontang dianalisis berdasarkan lima (5) elemen kesiapan Bontang Kota Pintar *(smart City readiness)* yaitu natur, struktur, infrastruktur, suprastruktur dan kultur. Pada Gambar 1 terlihat bahwa yang dimaksud natur adalah bagaimana daerah dapat memetakan potensi sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Struktur yaitu penguatan pemanfaatan potensi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola birokrasi. Infrastruktur meliputi kesiapan daya dukung infrastruktur fisik, infrastruktur digital (TIK) dan infrastruktur sosial yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Adapun suprastruktur adalah daya dukung kebijakan, penyelenggaraan kebijakan dan tata laksana dan hubungan kelembagaan.

Untuk mempercepat pembangunan menuju Bontang Smart City, pembangunan dan penguatan kesiapan Kota Bontang dalam menjalankan *smart city* harus terus diperkuat dari waktu ke waktu. Langkah awal, dilakukan pemetaan posisi atau kekuatan Kota Bontang dalam kesiapan menjalankan *smart city*. Berdasarkan hasil pemetaan, dilakukan analisis dan identifikasi rencana strategis pemanfaatan sumber daya alam *(nature)*, pembangunan struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan kultur sebagai bagian untuk meningkatakan daya dorong dan daya dukung pembangunan *smart city* Kota Bontang.

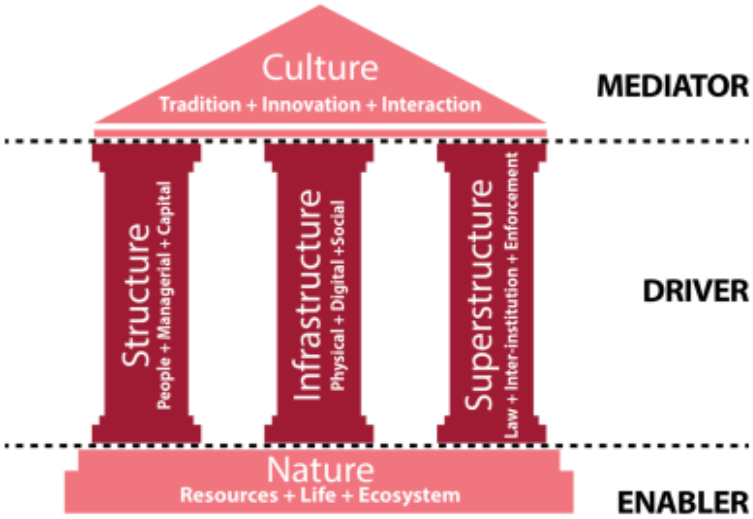

Gambar 1. Elemen *smart city readiness*
Sumber: Citiasia.Inc

Dimensi Pembangunan Smart City

Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik atau TIK, hingga pembuatan regulasi bukanlah indikator sebuah daerah dikatakan *smart* atau tidak. Namun demikian upaya tersebut sangat diperlukan untuk mendukung apakah daerah tersebut bisa mewujudkan *smart city* atau tidak. Dengan demikian elemen-elemen tersebut merupakan prasyarat bagi daerah agar dapat membangun *smart city*.

Dimensi pembangunan *smart city* Kota Bontang mengacu pada 6 (enam) dimensi *smart city* yang tertuang dalam *guideline smart city* Kemkominfo. Ke enam dimensi tersebut adalah *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society,* dan *smart environment.* Pembangunan *smart city* berarti bagaimana Kota Bontang menjadi sebuah kota yang pintar pada ke enam dimensi tersebut. Segenap organisasi perangkat daerah (OPD) harus bahu membahu bersama *stakeholders* lainnya untuk mencapai target pembangunan yang hendak dicapai pada ke enam elemen tersebut. Secara umum, penjabaran mengenai masing-masing elemen adalah sebagai berikut.

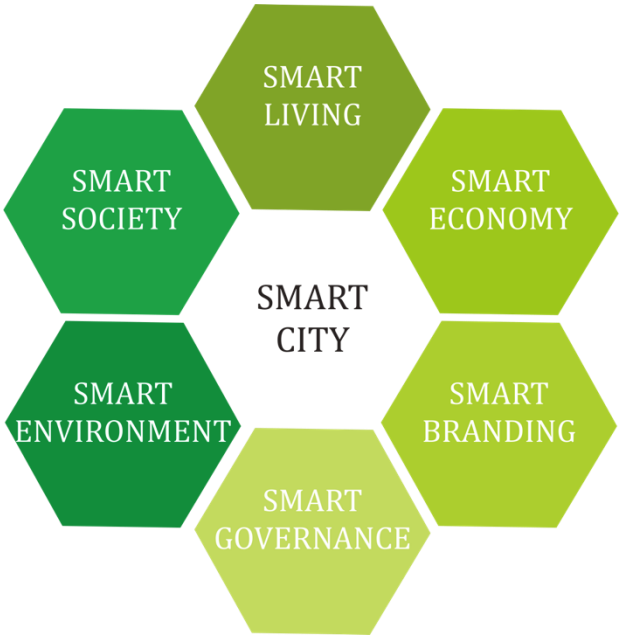

Gambar 1. Enam Dimensi Smart City
Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

1. Smart Governance

Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang pintar. Komponen tata kelola yang dimaksud meliputi pelayanan publik, tata kelola birokrasi, dan tata kelola kebijakan publik. Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi informasi yang terintegrasi.

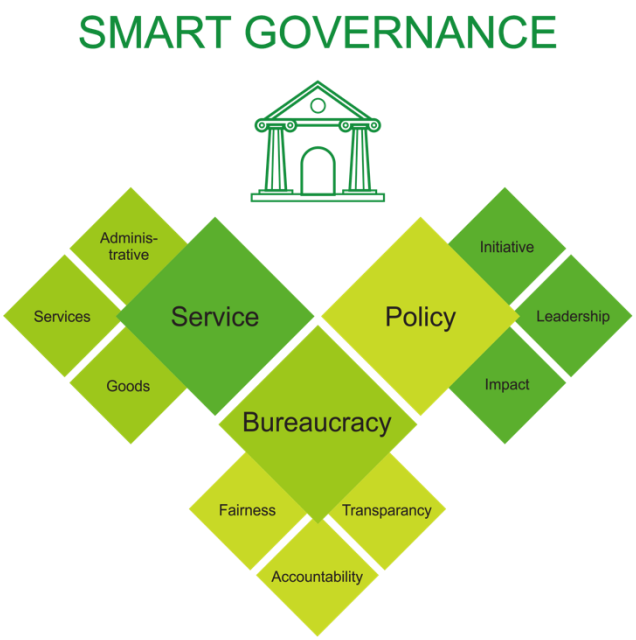

Gambar 2. Dimensi *Smart Governance*
Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

2. Smart Branding

Smart branding adalah inovasi pemasaran daerah untuk meningkatkan daya saing dan daya jual tiga elemen daerah, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Smart branding menjadi salah satu dimensi penting dalam Smart City untuk mendorong percepatan pembangunan melalui dukungan lokal, nasional, dan internasional. Dukungan tersebut dapat berbentuk pengembangan pariwisata, bisnis, dan wajah atau citra kota.

Pengembangan pariwisata meliputi pengembangan dan tata kelola destinasi atau tujuan wisata, fasilitas pendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*), dan pelayanan wisata (*hospitality).* Pengembangan bisnis meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi dari dalam dan luar

negeri, peningkatan aktifitas perdagangan, hingga pengembangan industri kreatif. Sedangkan terkait dengan wajah kota, pemerintah harus mengembangkan daya tarik fisik kota baik untuk memperindah tampilan kota, meningkatkan kenyamanan, dan menarik wisatawan. Diantaranya adalah dengan membangun *landmark* daerah, mempercantik batas kota (*edge*), hingga petunjuk arah (*signage*) dan lain-lain.

Gambar 3. Dimensi *Smart Branding*
Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

3. Smart Economy

Smart economy adalah tata kelola perekonomian daerah pintar. Smart economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Smart economy meliputi tata kelola industri, peningkatan kesejahteraan (*welfare*) dan aktifitas transaksi ekonomi daerah. Tata kelola industri yang terintegrasi meliputi industri primer (hulu), industri sekunder (industri pengolahan), dan industri tersier (hilir), termasuk industri jasa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan mulai dari peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun aktifitas transaksi masyarakat perlu didorong dengan layanan transaksi keuangan digital (e-money), layanan industri keuangan pendukung, dan transaksi perdagangan digital (*e-commerce*).

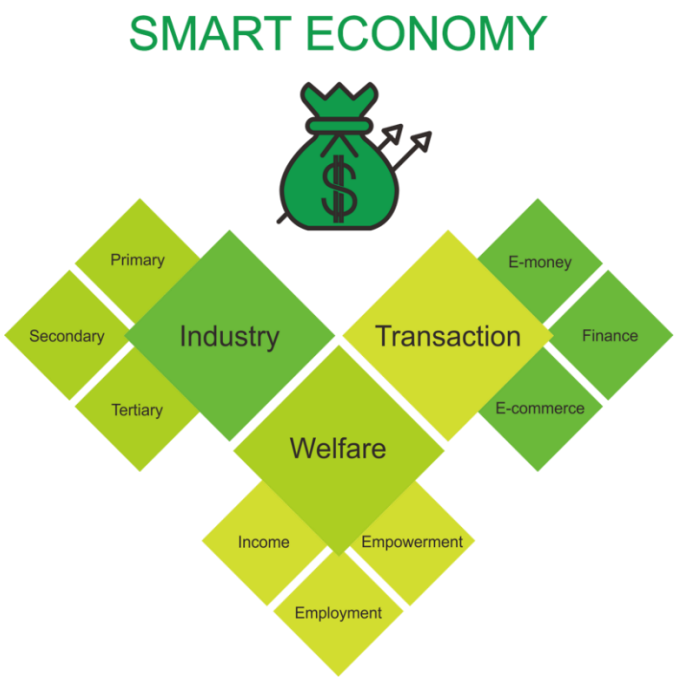

Gambar 4. Dimensi *Smart Economy*
Sumber: *Citiasia Inc. dan Kemkominfo*

4. Smart Living

Smart living merupakan salah satu dimensi Smart City yang berarti lingkungan hidup yang layak baik dalam konteks hunian maupun untuk usaha. Kelayakan lingkungan hidup ini minimal meliputi tiga elemen, yaitu kelayakan lingkungan yang harmonis, kualitas kesehatan, dan kenyamanan moda transportasi.

Harmonisasi lingkungan yang layak meliputi lingkungan hunian, lingkungan usaha, dan prasarana rekreasi keluarga. Adapun kualitas layanan kesehatan meliputi prasarana pelayanan kesehatan, prasaranan olahraga hingga jaminan ketersediaan makanan yang sehat bagi warga. Sedangkan kenyamanan moda transportasi meliputi transportasi untuk mendukung mobilitas individu, transportasi publik, dan jaminan transportasi untuk logistik barang.

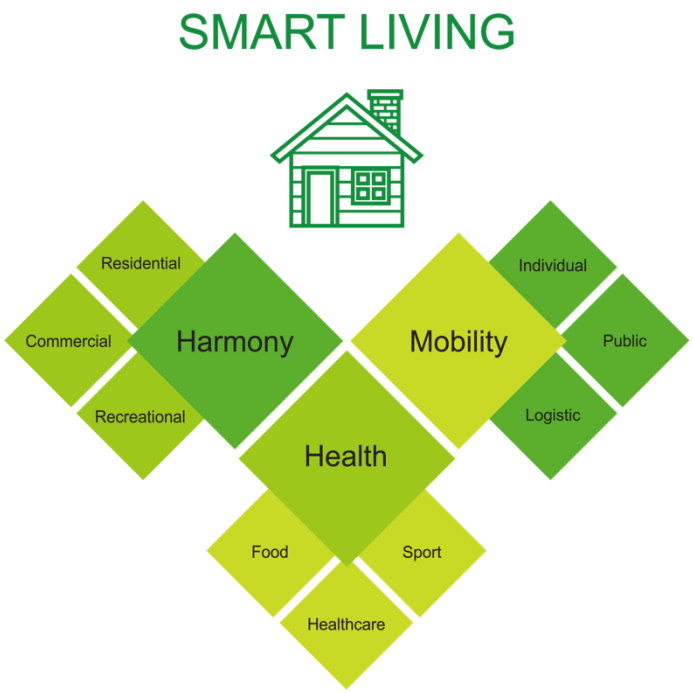

Gambar 5. Dimensi *Smart Living*
Sumber: *Citiasia Inc. dan Kemkominfo*

5. Smart Society

Smart socety sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Elemen dari smart society diantaranya paling tidak meliputi 3 hal yaitu komunitas, pendidikan, dan keamanan. Dalam hal komunitas bagaimana partisipasi individu dalam komunitas sosial dan digital bisa dioptimalkan perannya dalam pembangunan. Memberikan kesempatan pendidikan secara menyeluruh untuk semua warga. Baik pendidikan formal, informal hingga pendidikan inklusi bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Sedangkan keamanan artinya bagaimana menjamin keamanan jiwa, harta benda, hingga keamanan ketika terjadi bencana dan risiko lainnya.

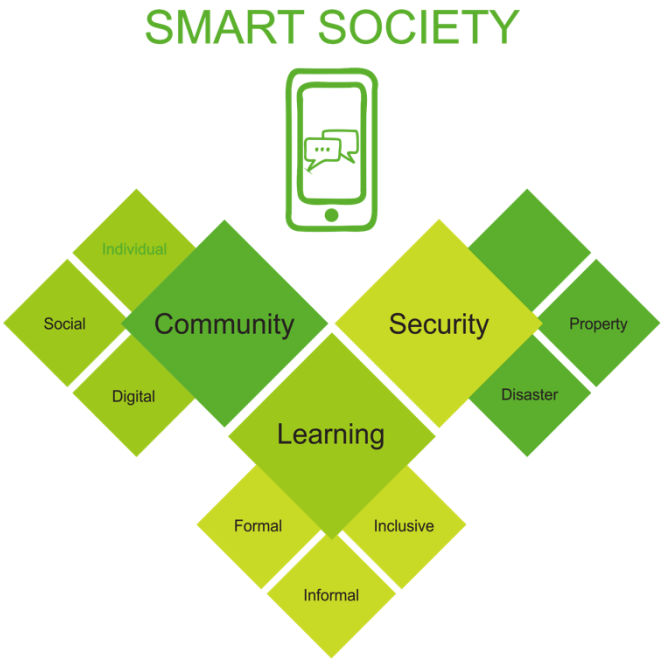

Gambar 6. Dimensi *Smart Society*
Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

6. Smart Environment

Ide dasar dari *smart environment* di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan teknologi sebagai elemen pendorong utama.

Tanggung-jawab pembangunan lingkungan paling tidak mencakup tiga hal yaitu perlindungan alam, tata kelola sampah dan limbah, serta tata kelola dan pemanfaatan energi. Perlindungan alam paling tidak mencakup menjaga kualitas tanah, udara, dan air. Tata kelola limbah meliputi limbah rumah tangga, limbah publik, hingga limbah industri. Sedangkan tata kelola energi meliputi bagaimana menggunakan sumber energi secara bijak dan efisien, penggunaan energi yang bertanggung-jawab, serta energi yang terbarukan. Kemandirian energi harus diupayakan dilakukan ditingkat daerah. Dengan demikian persoalan energi tidak akan mengganggu daya saing nasional.

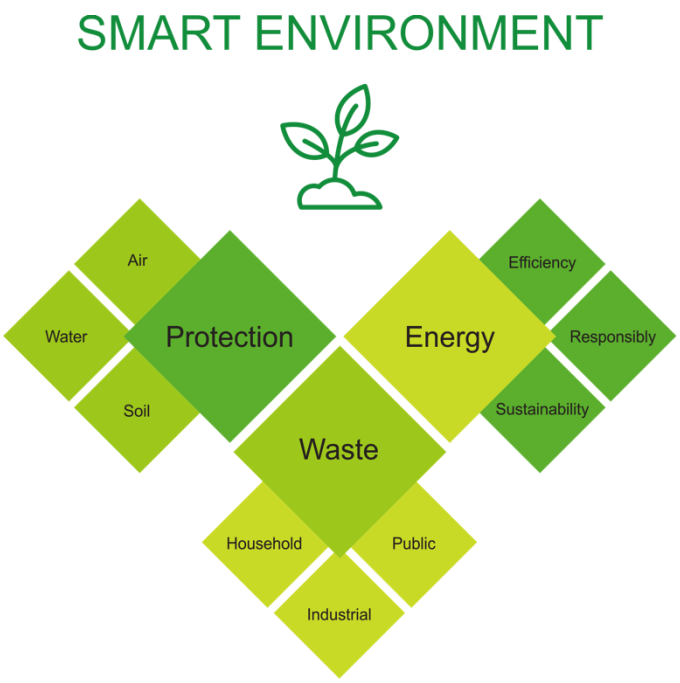

Gambar 7. Dimensi *Smart Environment*
Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

BAB II
VISI MISI dan SASARAN SMART CITY KOTA BONTANG

A. Visi Smart City

Pada dokumen sebelumnya, pemerintah Kota Bontang telah membuat kajian analisis smart city. Dokumen tersebut memuat analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan membangun smart city, analisis kesenjangan, hingga analisis visi pembangunan smart city Kota Bontang. Analisis ini dilakukan melalui kajian yang mendalam terhadap dokumen Kota Bontang baik berupa RPJP, RPJMD, Kota Bontang Dalam Angka, dan berbagai dokumen pendukung lainnya dan ditujukan untuk sebagai acuan pada pembangunan Kota Bontang 10 tahun kedepan 2020 - 2029. Disamping itu diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD kota bontang 2021 - 2026.

Berdasarkan penjabaran analisis pada kajian tersebut serta melalui proses *focus group discussion* (FGD) dengan para ahli serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bontang, telah dirumuskan visi smart city Kota Bontang 2020 – 2029 sebagai berikut:

“Mewujudkan masyarakat Bontang yang sejahtera dan humanis melalui inovasi yang berkelanjutan”

B. Misi Smart City Kota Bontang

Berdasarkan penjelasan visi *smart city* diatas, terdapat tiga kata kunci utama untuk diwujudkan, yaitu sejahtera, humanis dan inovasi. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah misi pembangunan smart city Kota Bontang berdasarkan penjabaran visi sebagai berikut:

- **Sejahtera:** terpenuhinya hak-hak penduduk Bontang, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan dan lingkungan hidup yang bersih, kelangsungan hidup yang aman dan nyaman. Kesejahteraan ini didukung oleh transparansi pelayanan publik, kekuatan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang, ditekankan pada pengembangan

potensi ekonomi kemaritiman dan berkebudayaan industri. Dengan cara ini akan membentuk kepercayaan diri dari masyarakat untuk mencapai kualitas sumber daya yang semakin baik.

- **Humanis:** Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sumber daya manusia yang mandiri dan berbudaya lokal. Meningkatkan kapasitas SDM Kota Bontang serta menjunjung tinggi interkasi sosial yang humanis, saling menghargai, toleran, dan agamis. Hal ini sesuai dengan struktur masyarakat Kota Bontang yang beraneka ragam suku dan budaya yang harus terus ditingkatkan daya saing-nya.
- **Inovasi:** Mendorong percepatan pembangunan Kota Bontang melalui inovasi dan kreativitas baik oleh penyelenggara birokrasi maupun oleh masyarakat, dunia pendidikan, dan swasta. Termasuk percepatan pembangunan industri kreatif melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

C. Sasaran Smart City

Sasaran smart city merupakan terjemahan dari visi smart city Kota Bontang yang memiliki kriteria *specific, measureable, appropriate, relevant, continuously improved,* dan *cost-effective*. Sasaran smart city adalah hal mengenai target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Rumusan sasaran smart city di Kota Bontang menjabarkan target yang harus dicapai oleh Kota Bontang dalam melaksanakan program smart city, berikut ini adalah sasaran smart city dari Kota Bontang;

1. Smart Governance

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart governance* di dalam dimensi smart city merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses

bisnis *(business process)* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Secara umum sasaran dari dimensi ini adalah:

"Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan real time"

Sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan dari tata kelola pemerintahan di Kota Bontang. Saat ini kondisi tata kelola dan tata pamong pemerintahan di Kota Bontang terkendala dengan sistem pelayanan yang masih bepusat di masing – masing instansi. Efisiensi kinerja pelayanan dan kebijakan publik antar instansi masih belum terlihat, sehingga peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan, yang diawali dengan cara pelayanan *Access All In One*, cepat, agar dapat berfungsi secara efisien, komunikatif dan real time melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Keterhubungan antar pelayanan publik dirasa perlu ditingkatkan guna merespon kebutuhan akan masyarakat dengan cepat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang.

2. Smart Branding

Dalam dimensi *smart branding* dirumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pemasaran potensi pariwisata dan industri pendukung, pemasaran potensi bisnis dan investasi, dan pemasaran potensi wajah atau citra kota dan infrastruktur lainnya, baik kepada lingkungan lokal, nasional, maupun internasional. *Smart branding* dilakukan untuk memperkenalkan produk dan potensi suatu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah serta mendongkrak perekonomian melalui dukungan eksternal. Sasaran yang berkenaan dengan *smart branding* dari Kota Bontang adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Branding Citra Kota, Branding Perdagangan, dan Penataan Wajah Kota"

Sasaran tersebut menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah yang diwujudkan dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi produk daerah asli Kota Bontang baik dalam lingkup lokal,

nasional, maupun internasional. Untuk menjadikan Kota Bontang menjadi *smart branding* maka perlu dibuat istilah yang menggabarkan karakteristik dari Kota Bontang. Strategi *branding* Kota Bontang diharapkan akan memperkuat *positioning* (daya saing dan keunikan) yang membantu pemasaran Kota Bontang secara lokal, nasional, dan internasional.

3. Smart Ekonomi

Dimensi *smart economy* menggaris bawahi mengenai tata kelola perekonomian. Dimensi ini lebih menitikberatkan perwujudan ekosistem perekonomian di daerah yang selaras dengan sektor unggulan daerah sehingga dapat memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat. Berikut ini adalah rumusan sasaran yang ada pada dimensi *smart economy* di Kota Bontang:

"Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat dan program *less-cash society* (meminimalkan penggunaan uang tunai)."

Sasaran tersebut diharapkan dapat mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat (pemahaman tentang keuangan) melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Demi mewujudkan *smart ekonomi* di Kota Bontang, antusias masyarakat Kota Bontang terhadap *less-cash society* harus terus meningkat dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu sosialisasi *less-cash society* secara menyeluruh terhadap masyarakat Kota Bontang menjadi sangat penting.

4. Smart Living

Dimensi dari *smart living* memperhatikan pada komponen-komponen lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang baik. Usaha perbaikan kualitas hidup dalam konsep smart city meliputi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akan rasa keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan hidup. Berikut ini adalah beberapa sasaran yang berkenaan dengan *smart living* berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kota Bontang.

"Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien"

Penyediaan sarana prasarana tempat tinggal yang layak huni ditandai dengan meluasnya cakupan pelayanan sarana prasarana tidak hanya di daerah kota dan perkotaan melainkan juga daerah-daerah terpencil. Selain itu, penyediaan sarana prasarana bagi lingkungan tinggal layak huni juga memastikan ketercukupan layanan yang tidak hanya nyaman tetapi juga mendukung aktualisasi diri warga.

Peningkatan hal tersebut berkaitan dengan visi dari smart city Kota Bontang yaitu mengisi aspek kenyamanan dan kesejahteraan. Hal tersebut juga menjawab tantangan pelayanan publik terkait ketersediaan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya penyediaan sarana prasarana yang layak ini tidak hanya melihat kebutuhan di kawasan permukiman desa dan kota melainkan juga melihat peluang pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pengendali pertumbuhan kota.

5. Smart Society

Dimensi *smart society* berfokus pada sosial masyarakat sebagai unsur sebuah kota. Manusia merupakan modal utama dari sosial masyarakat, maka dari itu sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga terwujud sebagai individu dan komunitas-komunitas yang berdaya saing dan kreatif. Modal sosial masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini diterapkan dengan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, dengan meningkatkan peran sosial masyarakat maka akan berdampak pada penguatan keserasian masyarakat dengan lingkungan. Nilai yang tertanam seperti inilah yang perlu dipertahankan dalam pengembangan konsep *smart city*. Maka dari itu berikut ini adalah sasaran dari *smart society* Kota Bontang.

"Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang

produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* (pemahaman tentang teknologi digital) yang tinggi"

Sasaran tersebut diharapkan dapat menjadikan masyarakat Bontang menjadi masyarakat yang produktif, komunikatif, serta interaktif dengan teknologi dan media digital. Pemerintah Kota Bontang juga telah meluncurkan Sistem Kesah Etam sebagai bentuk perwujudkan ekosistem sosio-teknis, agar masyarakat Bontang dapat memberi saran dan kritik melalui aplikasi tersebut.

6. Smart Environment

Dimensi *smart environment* merupakan dimensi tata kelola lingkungan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat serta meningkatkan keindahan lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi aspek kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan perlunya keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman. Maka dari itu berikut ini adalah sasaran dari *smart environment* Kota Bontang.

"Sasaran dari smart environment atau lingkungan pintar adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan di Kota Bontang."

Kota Bontang merupakan kota yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kota-kota sekitarnya, maka dari itu sasaran tersebut diharapkan dapat menjadikan lingkukan Kota Bontang menjadi lingkungan yang sehat, bersih, dan juga mempunyai tata lingkungan yang baik. Demi mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah Kota Bontang saat ini sudah melakukan perhatian khusus terhadap polusi udara, salah satunya yaitu dengan melakukan pemasangan detektor polusi udara. Diharapkan kedepannya pemerintah Kota Bontang dapat meningkatkan

inovasi-inovasi baru untuk membuat lingkungan Kota Bontang menjadi lingkungan yang baik, sehat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk mewujudkan visi dan sasaran pembangunan smart city melalui penetapan strategi pembangunan smart city yang efektif. Penyusunan strategi pembangunan smart city Kota Bontang telah mempertimbangkan analisis masa depan, analisis kesiapan daerah, RPJMD, rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan masukan berbagai pihak yang berkepentingan. Diantara pihak-pihak yang memberi masukan adalah organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya masyarakat seperti kelas inspirasi dan lain-lain. Penyusunan strategi pembangunan smart city dilakukan terhadap enam dimensi pembangunan smart city. Ke enam dimensi tersebut adalah *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment.*

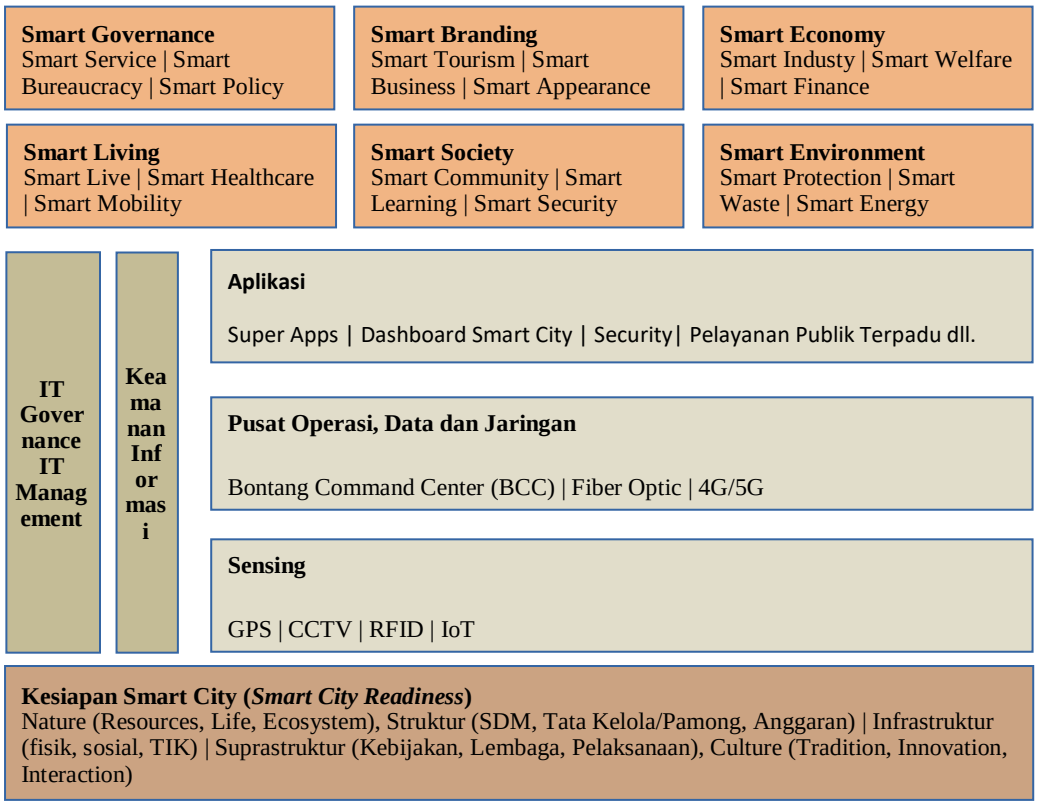

Gambar 9. Arsitektur *Smart City*.

Penyusunan strategi pembangunan smart city Kota Bontang mengacu pada kerangka kerja arsitektur smart city sebagaimana gambar 9. Pada dasarnya, pada level pelayanan birokrasi maupun pelayanan publik, smart city memberikan solusi dan melakukan inovasi peningkatan pelayanan berdasarkan enam dimensi mulai dari *smart governance* hingga *smart environment*. Namun secara tata kelola atau *IT management & IT Governance* akan dilakukan penguatan aplikasi, infrastruktur, hingga sensing dengan memanfaatkan perangkat keras termasuk diantaranya IoT *(Internet of Thing)*. Sedangkan kesiapan smart city atau *smart city readiness* akan terus ditingkatkan dari secara berkelanjutan. Strategi pembangunan smart city Kota Bontang berdasarkan dimensi *Smart City* adalah sebagai berikut;

1. Smart Governance

Dimensi *smart governance* bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Berikut ini adalah strategi pencapaian dari dimensi *smart governance*:

1. Peningkatan tata kelola birokrasi.
    a. Melengkapi infrastruktur tata kelola birokrasi.
    b. Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi tata kelola birokrasi.
    c. Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik.
    d. Mengembangkan sistem informasi dan *monitoring* pelayanan publik.
    e. Inventarisir, Assesment & Analisis semua layanan aplikasi yang ada di semua OPD

2. Peningkatan pelayanan publik
    a. Melengkapi infrastruktur pelayanan publik.
    b. Mewujudkan tata kelola keuangan dengan prinsip akuntanbilitas, keterbukaan, dan keadilan
    c. Mengembangkan kebijakan melalui partisipasi publik.
    d. Mengembangkan infrastruktur TIK.

e. Pemanfaatan *sharing* data
f. Peremajaan infrastruktur TIK
g. Penambahan bandwidth
h. Penambahan CCTV

3. Menyusun regulasi mengenai *smart city* di Kota Bontang.

1.1 Ekosistem Smart Governance

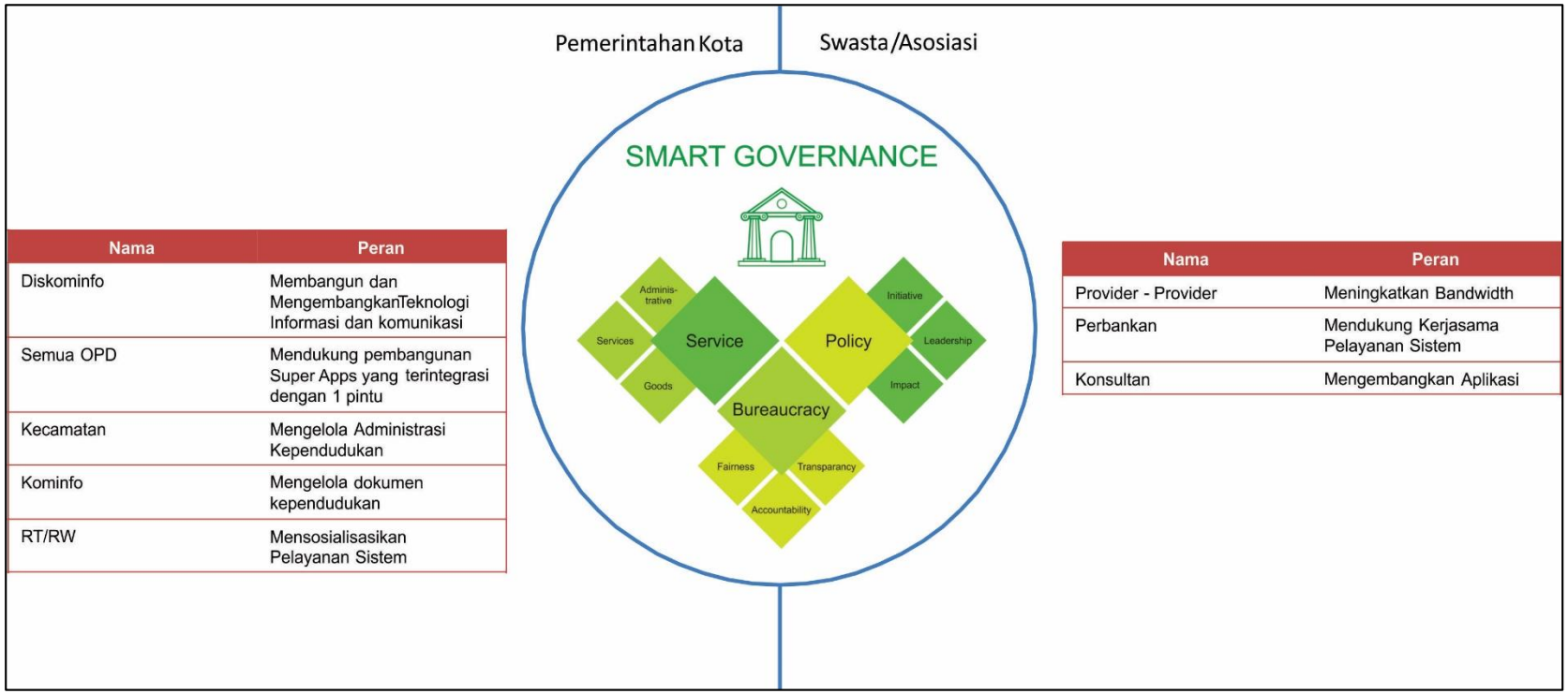

Nama	Peran
Diskominfo	Membangun dan MengembangkanTeknologi Informasi dan komunikasi
Semua OPD	Mendukung pembangunan Super Apps yang terintegrasi dengan 1 pintu
Kecamatan	Mengelola Administrasi Kependudukan
Kominfo	Mengelola dokumen kependudukan
RT/RW	Mensosialisasikan Pelayanan Sistem

Nama	Peran
Provider - Provider	Meningkatkan Bandwidth
Perbankan	Mendukung Kerjasama Pelayanan Sistem
Konsultan	Mengembangkan Aplikasi

Gambar 10. Ekosistem *Smart Governance*
Sumber: Kertas Kerja Pembangunan Smart City dan Analisa Penulis

Untuk mewujudkan beberapa program kegiatan pada dimensi *Smart Governance*, dibutuhkan kerjasama yang tercakup dalam ekosistem *Smart Governance*. Terdapat beberapa peran untuk mendukung semua kebutuhan didalam program kegiatan pada dimensi *Smart Governance*. Pada pemerintahan kota, Diskominfo mendukung untuk membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya dukungan semua OPD dalam integrasi pelayanan publik ke dalam satu Super Apps atau sistem pelayanan terintegrasi dengan 1 pintu, kecamatan mengelola administrasi kependudukan, Kominfo membantu mengelola data kependudukan, dan RT/RW membantu mensosialisasikan pelayanan sistem kepada masyarakat. Sementara itu swasta/asosiasi dan penyedia jasa mendukung untuk membantu meningkatkan bandwidth, perbankan mendukung kerjasama dalam tiap-tiap pelayanan sistem yang akan dibangun, dan konsultan mendukung untuk mengembangkan aplikasi. Dengan demikian ekosistem smart city akan memberikan manfaat yang optimal terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi.

2. Smart Branding

Dimensi *smart branding* bertujuan untuk memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan 4 (empat) elemen, yaitu pariwisata, investasi, perdagangan dan citra kota. Dengan meningkatnya *brand value* daerah akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan *smart branding* Kota Bontang dapat dicapai dengan strategi-strategi yang mendukung. Adapun strategi pengembangan dari *smart branding* sebagai berikut:

1. Mengembangkan *branding* sesuai dengan konteks Kota Bontang.
2. Mengembangkan pariwisata berbasis amenitas, atraksi, dan *hospitality*.
3. Mengambangkan kegiatan festival kemaritiman.
4. Menguatkan sarana dan prasarana parawisata.
5. Menguatkan visualisasi dan strategi komunikasi branding Kota Bontang.
6. Mengembangkan citra kota (*city appearance*) dengan menonjolkan karakter daerah yang unggul di Kota Bontang.

2.1 Ekosistem Smart Branding

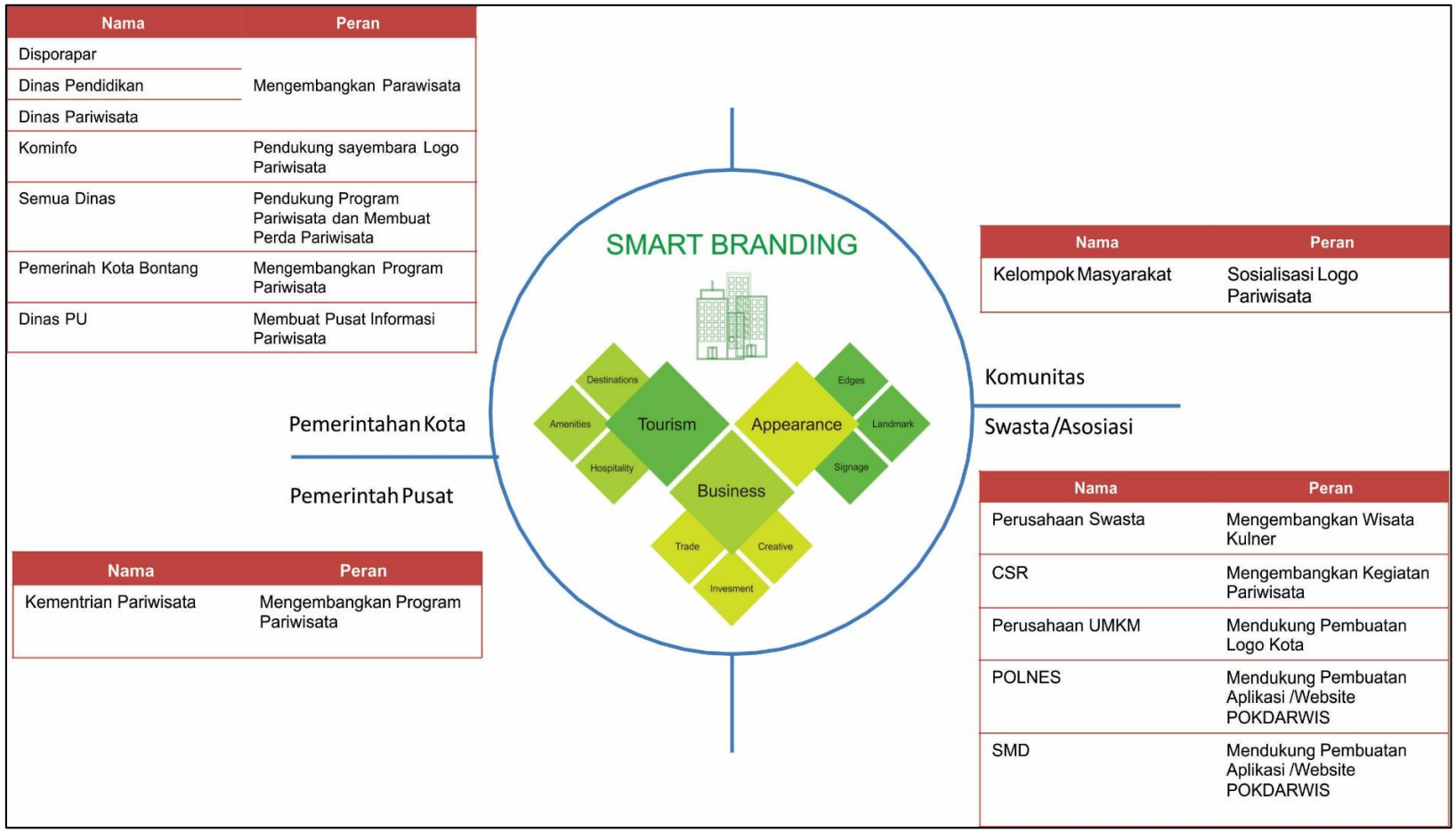

Gambar 11. Ekosistem *Smart Branding*
Sumber : Kertas Kerja Pembangunan Smart City dan Analisa Penulis

Untuk mewujudkan beberapa program kegiatan yang ada pada dimensi *Smart Branding*, terdapat beberapa peran yang tercakup dalam ekosistem *Smart Branding*. Pada pemerintahan Kota Bontang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) berperan dalam membantu mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Bontang dengan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Beberapa kegiatan tersebut diantaranya pengembangan destinasi wisata, atraksi wisata, *branding*, dan logo pariwisata hingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung (*amenities*) serta budaya melayani wisatawan (*hospitality*). Semua dinas juga sangat berperan dalam mendukung semua program dan kegiatan promosi pariwisata sebagai sebuah ekosistem.

Untuk mendukung keberhasilan ekosistem pariwisata di Kota Bontang juga diperlukan produk hukum daerah terkait dengan pengembangan pariwisata Kota Bontang dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Diskominfo perlu bekerjasama dalam membuat dan mengembangkan pusat informasi pariwisata secara offline maupun online. Diantaranya promosi melalui media sosial online seperti facebook, instagram, youtube, twitter, dan lain-lain.

Kota Bontang juga harus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Pariwisata) atau lembaga yang terkait dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata serta promosi pariwisata untuk tingkat nasional dan internasional, termasuk mengembangkan kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis). Promosi dan *branding* pariwisata Kota Bontang juga perlu melibatkan masyarakat sebagai *stakeholder* utama program pariwisata. Pemerintah Kota Bontang juga perlu melibatkan pihak swasta, asosiasi penyelenggara jasa wisata, perusahaan swasta untuk turut serta dalam mengembangkan konten wisata diantaranya wisata kuliner, atraksi wisata, seni dan budaya untuk memperkaya daya tarik wisata. Pemerintah Kota Bontang juga perlu memanfaatkan sumber pembiayaan pembangunan pariwisata melalui non APBD seperti dana CSR, kerjasama pemerintah swasta, dan sumber-sumber dana lainnya. Kerjasama yang erat juga perlu dibangun dengan civitas akademika di Kota Bontang dan sekitarnya untuk memperkuat ekosistem inovasi dan promosi pariwisata.

3. Smart Economy

Dimensi *smart economy* merupakan tata kelola perekonomian pintar dengan tujuan mewujudkan ekosistem perekonomian Kota Bontang yang mampu menjawab tantangan di era informasi yang *disruptive*, yaitu perubahan yang sangat mendasar dan signifikan dan menuntut tingkat adaptasi yang super cepat. Misalnya saja penggunaan aplikasi ojek online yang memaksa industri transportasi mengubah strategi bisnisnya. Untuk mengikuti perubahan yang terjadi di era disrupsi ini, peningkatan pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap produk keuangan (*financial literacy)* perlu dilakukan diantaranya untuk mewujudkan ekosistem transaksi keuangan digital masyarakat yang meminimalkan uang tunai (*less-cash society*), termasuk melakukan digitalisasi transaksi yang dilakukan di pasar-pasar yang ada di Kota Bontang. Seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk merumuskan strategi pertumbuhan tentang pengembangan pasar tematik dan pasar dengan pendekatan baru, pengembangan pasar geografis baru, segmen demografis atau psikografis baru, ataupun benar-benar pengguna baru. Berikut ini adalah sasaran pembangunan *smart economy*:

1. Mengembangkan dan meningkatkan produk-produk unggulan yang berkualitas, bernilai ekonomis, dan sarana yang memadai.
2. Mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor dengan penggunaan teknologi.
3. Mengembangkan SDM sentra-sentra perekonomian terpadu pada kawasan industri.
4. Mengembangkan wisata kuliner asli Kota Bontang.
5. Mengembangkan *e-commerce* terpadu Kota Bontang, bekerjasama dengan penyedia jasa *e-commerce* nasional.
6. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara online maupun offline.
7. Mewujudkan masyarakat *lesscash* (meminimalkan uang tunai) melalui transaksi elektronik.

3.1 Ekosistem Smart Economy

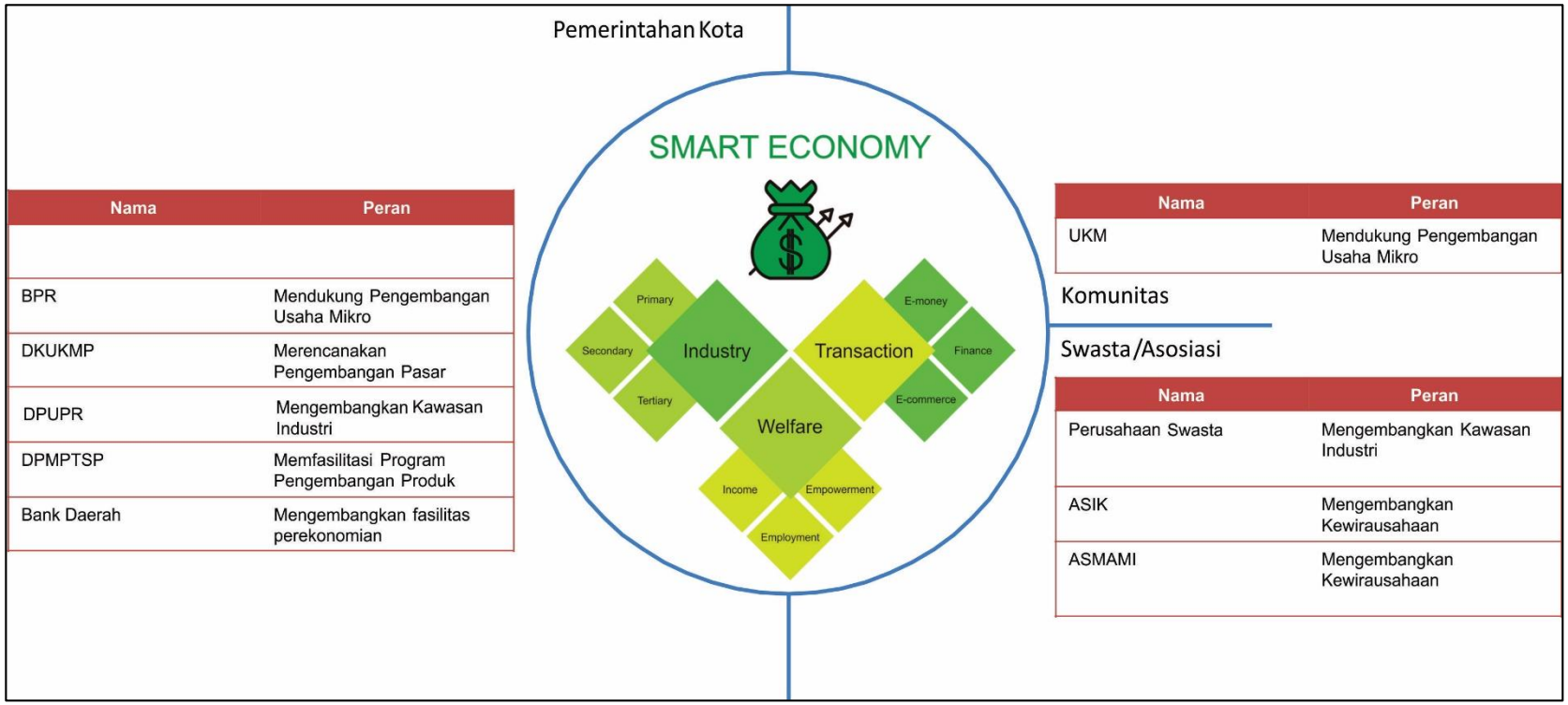

Nama	Peran
BPR	Mendukung Pengembangan Usaha Mikro
DKUKMP	Merencanakan Pengembangan Pasar
DPUPR	Mengembangkan Kawasan Industri
DPMPTSP	Memfasilitasi Program Pengembangan Produk
Bank Daerah	Mengembangkan fasilitas perekonomian

Nama	Peran
UKM	Mendukung Pengembangan Usaha Mikro

Nama	Peran
Perusahaan Swasta	Mengembangkan Kawasan Industri
ASIK	Mengembangkan Kewirausahaan
ASMAMI	Mengembangkan Kewirausahaan

Gambar 12. Ekosistem *Smart Economy*
Sumber : Kertas Kerja Pembangunan Smart City dan Analisa Penulis

Dalam mengelola dan mewujudkan perekonomian yang pintar di daerah saat ini diperlukan banyak pihak yang berperan penting untuk bekerjasama dalam membangun dan mendukung program kegiatan pada dimensi *Smart Economy*. Terdapat beberapa peran yang tercakup dalam Ekosistem *Smart Economy*. Pada Pemerintahan Kota, DPUPR berperan dalam mengembangkan kawasan perindustrian di Kota Bontang, BPR berperan dalam mendukung pengembangan usaha mikro, DKUKMP berperan dalam membantu dalam merencanakan pengembangan pasar, DPMPTSP berperan dalam memfasilitasi program pengembangan produk, dan Bank Daerah berperan dalam mengembangkan fasilitas perekonomian. Pada Komunitas, UKM berperan dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kota Bontang. Pada Swasta/Asosiasi, Perusahaan swasta berperan dalam mengembangkan kawasan industri, Asik dan Asmami berperan dalam mengembangkan kewirausahaan yang ada di Kota Bontang.

4. Smart Living

Dimensi *smart living* diperlukan untuk menjamin kualitas hidup masyarakat Kota Bontang. Sasaran utama dimensi *smart living* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal, transportasi publik, dan pelayanan kesehatan yang layak, nyaman, dan efisien. Berikut ini adalah beberapa sasaran dari *smart living* Kota Bontang:

1. Mewujudkan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara permukiman, Kegiatan bisnis dan fasilitas rekreasi.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan tempat tinggal yang layak sesuai dengan tata ruang.
3. Mewujudkan sosial sistem infrastruktur dan sistem informasi kesehatan yang terpadu.
4. Mengembangkan mobilitas yang mudah bagi orang dan barang.
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur, baik digital, fisik maupun sosial.
6. Meningkatkan sarana prasarana yang mendukung harmonisasi lingkungan pemukiman, komersial, dan hiburan keluarga.
7. Meningkatkan akses terhadap prasarana dan tenaga medis yang nyaman dan berkualitas.

4.1 Ekosistem Smart Living

Nama	Peran
Dinas Kesehatan	Membangun dan mengembangkan Program Kesehatan
Kominfo	
Dinas Perhubungan	
Dinas PUPR	Mengembangkan sarana dan prasarana Transportasi
Kepolisian	
Bapelitbang	
Dinas Perkim	
BLH	Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kota
DPKPP	
Kelurahan	
Kecamatan	
BPBD	Mengoptimalisasi Teknologi Informasi
Sekda	Mengelola dan mengembangkan Kekayaan Budaya
Paguyuban	

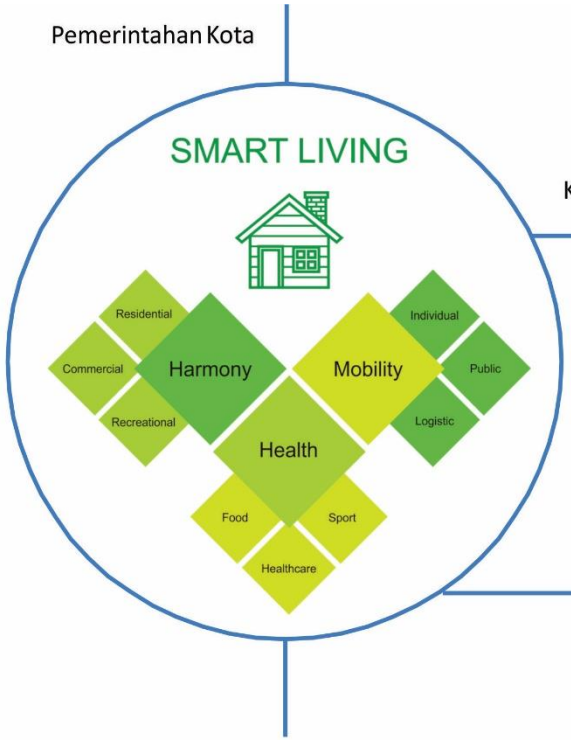

Nama	Peran
Komunitas Budaya	Mengelola dan mengembangkan Kekayaan Budaya

Nama	Peran
RS	Membangun Sistem Informasi dan pelayanan Kesehatan
BPJS	Mengoptimalisasi program informasi kesehatan
PMI	Membangun dan mengembangkan Program Kesehatan

Nama	Peran
Kementrian kesehatan	Mengoptimalisasi program informasi kesehatan

Gambar 13. Ekosistem *Smart Living*
Sumber: Kertas Kerja Pembangunan Smart City dan Analisa Penulis

Demi mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien pada dimensi *Smart Living*, terdapat beberapa pihak yang berperan penting untuk berkerjasama dalam melaksanakan program kegiatan untuk 10 tahun kedepan. Pada Pemerintah Kota Bontang, Dinas Kesehatan berperan dalam membangun dan mengembangkan program kesehatan dan Dinas Kominfo membantu pengembangan aplikasi. Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Kepolisian, Bapelitbang, dan Dinas Perkim berperan dalam mengembangkan, mengatur, dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Bontang. BLH, DPKPP, Kelurahan, Kader Terlatih dan Kecamatan berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di Kota Bontang. BPBD berperan dalam mengoptimalisasikan teknologi informasi. Sekda dan Paguyuban berperan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Kota Bontang. Komunitas Budaya berperan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Kota Bontang. Adapun Swasta/Asosiasi, Rumah Sakit Daerah berperan dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan pelayanan kesehatan dibantu Diskominfo, BPJS dan Kementrian Kesehatan berperan dalam mengoptimalkan program informasi di bidang kesehatan, dan PMII berperan dalam membangun dan mengembangkan program-program kesehatan.

5. Smart Society

Dimensi *smart society* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah wilayah. Interaksi manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Hal ini berkesesuaian dengan tujuan dari *smart society* untuk mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran dan pendidikan (*learning*) dan sistem keamanan (*security*). Berikut ini adalah sasaran-sasaran dari *smart society*:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal produktivitas dan komunikasi didukung literasi yang tinggi.

2. Mengembangkan komunitas-komunitas kreatif.
3. Mengembangkan kapasitas SDM yang berdaya saing dengan *technopreneurship skill*.
4. Mengembangkan sistem pendidikan yang terpadu.
5. Mengembangkan literasi digital masyarakat.
6. Menguatkan kerjasama pemerintah, industri, dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk memajukan Kota Bontang.
7. Mengoptimalkan kelompok-kelompok dalam masyarakatat untuk bersama-sama meningkatkan kualiats hidup masyarakat.
8. Mengembangkan aplikasi tata ruang dan perencanaan pembangunan berbasis geo spasial.
9. Meningkatkan sistim keamanan lingkungan.
10. Membangun budaya agamis yang humanis dalam bermasyarakat.

5.1 Ekosistem Smart Society

Nama	Peran
BUMN	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tempat tinggal
Dinas Perkim	
DinasPUPR	
DPKPP	
Dinas Sosial	
Kecamatan	Membangun sistem informasi kependudukan dan sosial
Kelurahan	
DPMPTSP	
Bapenda	
Kominfo	Membangun program pelayanan dan rehabilitasi
Dinas Pendidikan	Mengembangkan program budaya membaca dan membudayakan perpustakaan
Dinas Kesehatan	Membangun Integrasi Big Data Sosial
DSPM	Membangun program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Satpol PP	

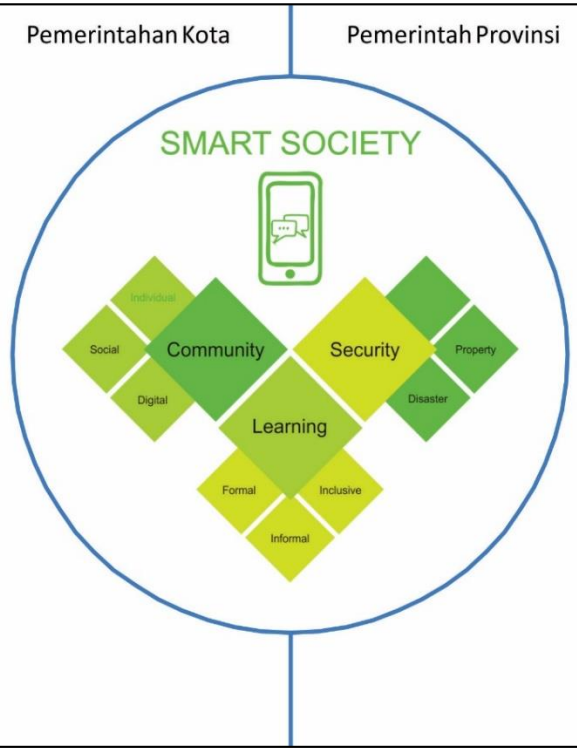

Nama	Peran
Pemerintah Provinsi	Mengembangkan fasilitas pendidikan dengan kualitas internasional

Gambar 14. Ekosistem *Smart Society*
Sumber: Kertas Kerja Pembangunan Smart City dan Analisa Penulis

Demi mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis pada dimensi *Smart Society*, dibutuhkan kerjasama antar pihak-pihak yang tercakup dalam Ekosistem *Smart Society*. Pada Pemerintah Kota Bontang terdapat beberapa pihak yang berperan penting untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 10 tahun kedepan. Dinas Perkim, Dinas PUPR, dan DPKPP berperan dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tempat tinggal. Aktifitas tersebut juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan BUMN atau swasta. Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, DPMPTSP, dan Bapenda bersama Diskominfo berperan dalam membangun sistem informasi kependudukan dan sosial. Kominfo berperan dalam membangun program pelayanan dan rehabilitasi masyarakat terutama terkait dengan aplikasi dan system informasi yang dibutuhkan. Dinas Pendidikan berperan dalam mengembangkan program budaya membaca dan membudayakan perpustakaan. Dinas Kesehatan berperan dalam membangun integrasi Big Data sosial kemasyarakatan. DSPM dan Satpol PP berperan dalam membangun program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam mengembangkan fasilitas pendidikan dengan kualitas internasional.

6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah smart city adalah pengelolaan lingkungan yang pintar. Apa yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *smart environment* di dalam smart city adalah arah untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dari visi kota pintar, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang smart city yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendukungnya.

1. Mengembangkan tatakelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memanfaatkan penggunaan TIK.

2. Mengembangkan sistem tatakelola limbah, persampahan rumah tangga, dan industri.
3. Mengembangkan sistem peringatan dini dan tanggap bencana.
4. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi ramah lingkungan.
5. Menguatkan budaya di masyarakat untuk mengolah dan memilah sampah dari sumbernya.
6. Menguatkan budaya hemat air dan energi.

6.1 Ekosistem Smart Environtment

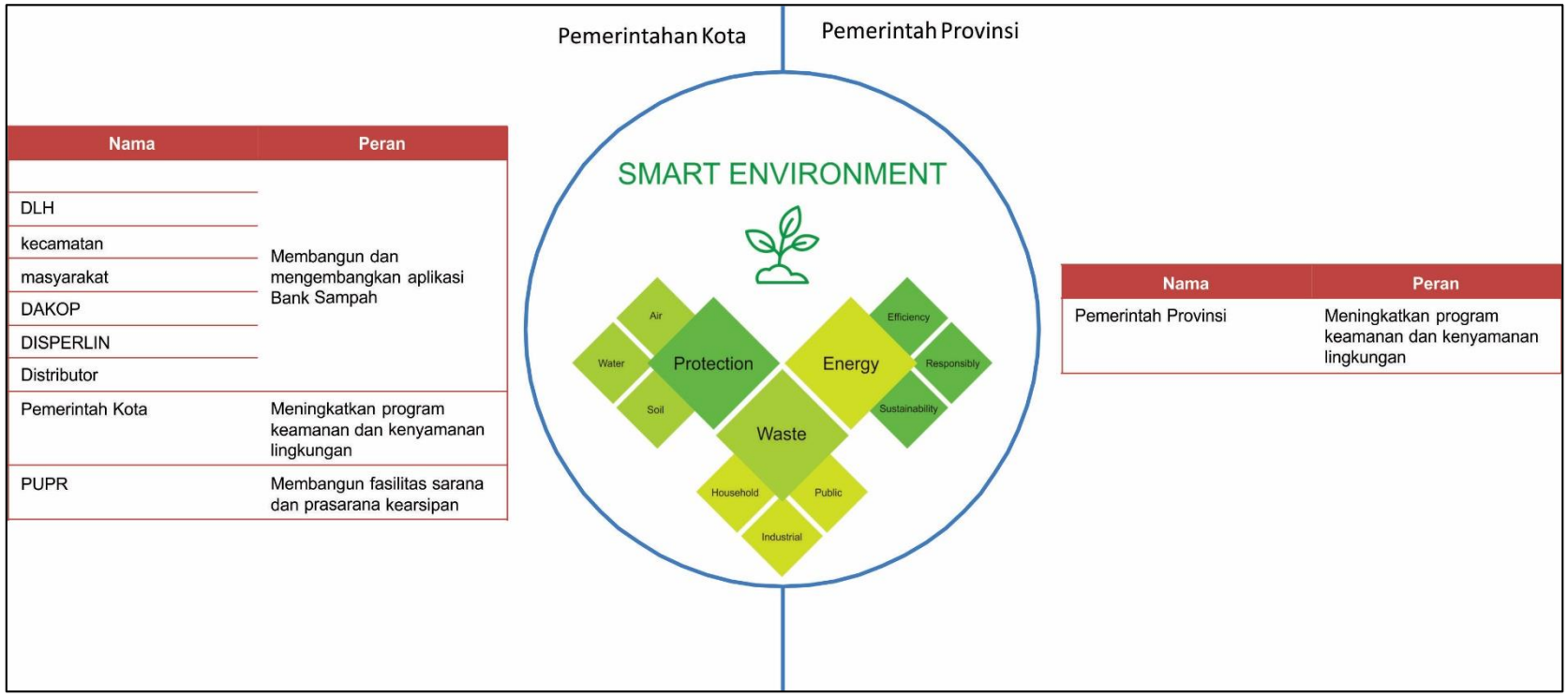

Nama	Peran
DLH	Membangun dan mengembangkan aplikasi Bank Sampah
kecamatan	
masyarakat	
DAKOP	
DISPERLIN	
Distributor	
Pemerintah Kota	Meningkatkan program keamanan dan kenyamanan lingkungan
PUPR	Membangun fasilitas sarana dan prasarana kearsipan

Nama	Peran
Pemerintah Provinsi	Meningkatkan program keamanan dan kenyamanan lingkungan

Gambar 15. Ekosistem *Smart Environtment*
Sumber : Kertas Kerja Pembangunan Smart City dan Analisa Penulis

Untuk mengelola dan mewujudkan lingkungan yang pintar pada dimensi *Smart Environment*, dibutuhkan kerjasama antar pihak-pihak yang tercakup dalam ekosistem *Smart Environment*. Pada Pemerintahan Kota Bontang terdapat beberapa pihak yang berperan peting untuk melaksanakan program kegiatan yang akan dilakukan dalam 10 tahun kedepan. DLH, Kecamatan, Masyarakat, DAKOP, Disperlin, dan Perusahaan termasuk BUMN (melalui sana CSR) berperan dalam membangun dan mengembangkan aplikasi yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan. Misalnya aplikasi manajemen Bank Sampah. Pemerintah Kota juga berperan dalam meningkatkan program keamanan dan kenyamanan lingkungan. PUPR berperan dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana untuk menjaga stabilitas lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam meningkatkan program keamanan dan kenyamanan lingkungan. Termasuk pengembangan energi berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA AKSI KESIAPAN SMART CITY

Rencana aksi smart city adalah program dan kegiatan smart city yang disiapkan untuk memperkuat daya dukung pembangunan smart city. Rencana aksi diperlukan dalam mendukung visi dan strategi pembangunan daerah. Rencana aksi merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam rumusan masterplan smart city Kota Bontang sehingga dapat menjawab problematika dengan jelas dan objektif terkait dengan perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi smart city terbagi menjadi 4 rencana, berikut ini adalah empat pembagian rencana aksi smart city Kota Bontang:

a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city.
b. Rencana membangunan Infrastruktur pendukung smart city.
c. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart city.
d. Rencana penguatan SDM melalui literasi smart city.

A. Rencana Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City

Pembangunan dan pengembangan Kota Bontang melalui pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, serta terus melakukan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

1. Penyusunan masterplan smart city.
2. Penyusunan regulasi daerah smart city Kota Bontang.
3. Pengembangan kelembagaan smart city Kota Bontang.
4. Penyusunan tata kelola smart city Kota Bontang.
5. Kerjasama antar kota.
6. Pengembangan ekosistem smart city Kota Bontang ke masyarakat.

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung Smart City

Rencana pengembangan infrastruktur pendukung *smart city* merupakan rencana yang memuat kebutuhan infrastruktur agar tujuan pembangunan *smart city* ini dapat tercapai. Secara umum infrastruktur yang akan dikembangkan dalam program *smart city* adalah infrastruktur digital, infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial.

1. Infrastruktur Digital

Dalam pengembangan infrastruktur digital terdapat beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah jaringan komputer, pusat data dan ketersediaan ruang kendali. Secara umum Kota Bontang telah memiliki jaringan internet yang telah menghubungkan seluruh OPD melalui jaringan *fiber optic*. Dalam hal ini, program yang masih dibutuhkan oleh Kota Bontang diantaranya adalah:

a. Pengembangan jaringan *fiber optic* atau pita lebar.
b. Pembangunan infrastruktur jaringan internet sampai ke pulau terpencil.
c. Peremajaan infrastruktur IT yang lama (server, radio, dan beberapa perangkat Datacom lainnya.)
d. Penambahan kamera pengawas (CCTV) di lokasi strategis Kota Bontang.
e. Penyediaan sensor polusi udara di lokasi strategis Kota Bontang.
f. Penambahan bandwidth.

2. Infrastruktur Fisik

Tidak hanya didukung dengan infrastruktur digital, untuk mewujudkan konsep smart city tetapi juga diperlukan elemen fisik yang mendukung. Secara garis besar infrastruktur fisik yang diperlukan adalah kelancaran mobilisasi dari setiap wilayah Kota Bontang. Infrastruktur fisik yang perlu dikembangkan dalam *smart city* Kota Bontang adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan dan pemeliharaan jalanan pemukiman penduduk.

b. Pengembangan Pelabuhan di Kota Bontang.
c. Peningkatan dan pemeliharaan drainase permukiman penduduk
d. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar Permenkes.
e. Pembangunan mall pelayanan publik.

3. Infrastruktur Sosial

a. Pembangunan RTH dan taman bermain di Kota Bontang.
b. Revitalisasi sumber daya air.
c. Membangun dan mengembangkan fasilitas sosial untuk PMKS (Penyandang masalah kesejahterahan sosial).
d. Pengembangan fasilitas dan pusat olaharaga.

C. Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak Kota Bontang merupakan upaya perwujudan untuk tata kelola daerah yang lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan pengembangan aplikasi yang diperlukan oleh Kota Bontang, diantaranya:

1. Mengembangkan integrasi aplikasi tata kelola birokrasi (*E-planning*, *E-budgeting*, *E-Monitoring*, E-Rup (Sirup), Sinnerji (Sistem Indikator Kinerja Individu), e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dan lain-lain.
2. Mengembangkan integrasi aplikasi pelayanan publik (perijinan, pengaduan masyarakat).
3. Mengembangkan Aplikasi SIMTARU Kota Bontang.
4. Pembangunan aplikasi pelayanan masyarakat (etc: Smart Infrastruktur, aplikasi yang dapat menyajikan data terbuka)
5. Membangun sistem informasi geo-spasial yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Pengembangan aplikasi atau platform perizinan terpadu satu pintu.

7. Pengembangan aplikasi atau platform UMKM yang menjangkau keseluruhan UMKM di Kota Bontang.
8. Pengembangan sistem informasi pariwisata Kota Bontang.
9. Pengembangan aplikasi SIM Jaring Pengaman Sosial (JPS).
10. Pengembangan dan penerapan sistem pengendalian surat-menyurat dan disposisi secara elektronik (e-office)
11. Pengembangan perpustakaan online yang terintegrasi (smart library/e-library).
12. Pengembangan sistem informasi kesehatan (e-health yang terintegrasi).
13. Aplikasi pendukung tata kelola birokrasi dan pelayanan publik lainnya

D. Rencana Penguatan SDM Melalui Literasi Smart City

Literasi digital adalah upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas SDM dalam kemampuannya menggunakan faktor teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat, menemukan, memanfaatkan serta mengkomunikasikan konten digital secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab. Pengetahuan dan pemanfaatan konsep smart city perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan konsep smart city. Untuk terwujudnya pemahaman tersebut, maka terdapat program-program yang berkaitan dengan literasi smart city, yaitu:

1. Mensosialisasikan dan bimtek pemanfaatan TIK yang produktif dan bermanfaat.
2. Mensosialisasikan dan bimtek pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan skill dan keterampilan guna mendukung program smart city.
3. Program sosialisasi dan bimtek internet dan digital masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi dan bimtek kepada pihak eksternal melalui kegiatan *branding* dan promosi pembangunan smart city kepada masyarakat, calon investor, kontraktor, pelaku bisnis, kampus dan lain-lain.
5. Kegiatan literasi ekonomi digital kepada UMKM, kampus, dan masyarakat luas.

BAB V
PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY

Mewujudkan Kota Bontang yang pintar atau Bontang smart city memerlukan waktu dan proses. Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun atau bahkan dalam lima tahun kepemimpinan seorang kepala daerah. Masterplan smart city Kota Bontang memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat untuk mewujudkan Bontang Kota Pintar dalam lima hingga sepuluh tahun. Namun demikian, agar perencanaan dalam masterplan ini dapat mengikuti maupun berakselerasi dengan perubahan teknologi, kebijakan pemerintah pusat maupun tren perubahan perilaku masyarakat, masterplan smart city hendaknya secara rutin dilakukan *review*, misalnya dua tahun sekali atau sesuai kebutuhan pemerintah Kota Bontang, menyesuaikan dengan RPJP dan RPJMD yang baru.

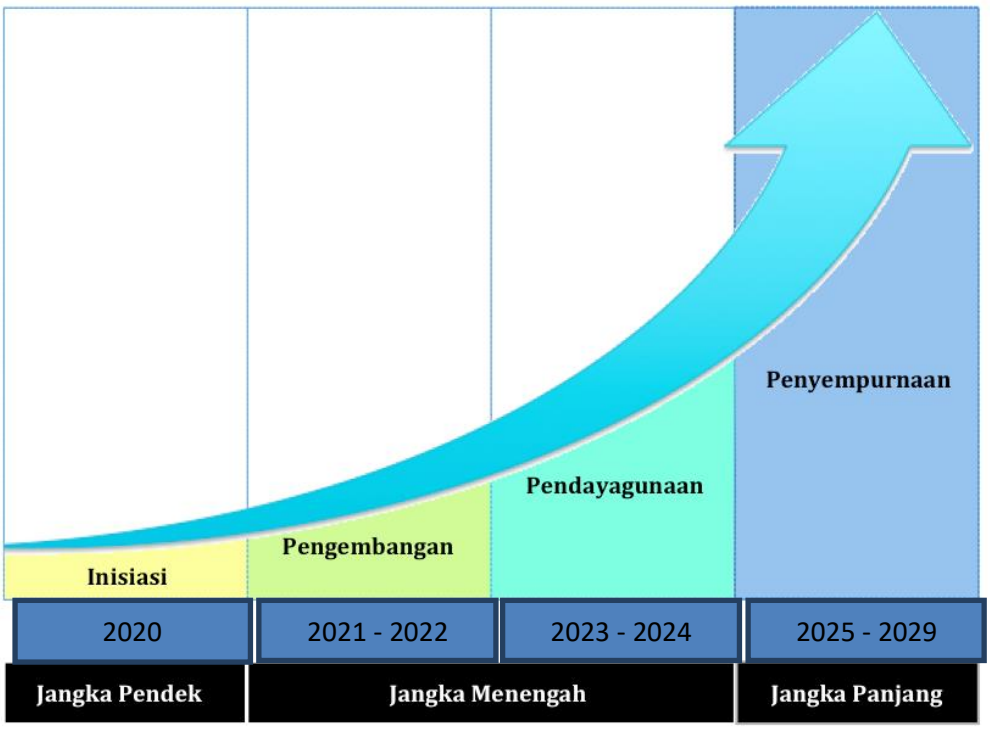

Gambar 16. Roadmap Pembangunan Smart City Kota Bontang
Sumber: Citiasia Inc. dan Kemkominfo

Tujuan akhir dari masterplan Bontang smart city adalah untuk mewujudkan Visi Smart City Kota Bontang, yaitu "***mewujudkan masyarakat Bontang yang sejahtera dan humanis melalui inovasi yang berkelanjutan"*** pada tahun 2029. Adapun secara garis besar, *road map* atau peta jalan untuk mewujudkan smart city Kota Bontang tersebut dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek (2020), jangka menengah (2021-2024), dan jangka panjang (2025-2029).

Peta jalan jangka pendek (2020) merupakan fase inisiasi atau permulaan dibangunnya smart city Kota Bontang. Sementara itu pada jangka menengah (2021-2024) dibagi kedalam dua fase yaitu fase pengembangan (2020-2022) dan fase pendayagunaan (2023-2024). Fase pengembangan berakhir pada tahun 2021 menyesuaikan dengan masa berakhirnya periode RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Adapun pada 5 (lima) tahun kedua yaitu tahun 2025-2029 merupakan fase penyempurnaan.

Fase permulaan atau inisiasi di tahun 2020 merupakan fase dimana Kota Bontang mulai membangun smart city dengan memberikan perhatian pada penguatan SDM, pembangunan infrastruktur dan aplikasi serta memulai pemanfaatannya untuk peningkatan tata kelola birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fase pengembangan (*developing)* yang dilakukan pada tahun 2020-2022 merupakan fase pengembangan kesiapan smart city (aplikasi, infrastruktur, literasi, kelembagaan), peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan dan pengembangan smart city. Fase pendayagunaan (*managed)* yaitu pada tahun 2023-2024 secara umum menggambarkan bahwa Kota Bontang sudah harus menjalankan program smart city dengan baik. Memiliki SDM yang baik, infrastruktur, aplikasi, regulasi, dan kelembagaan yang sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang paling penting peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta peningkatan kualitas hidupnya.

Pada 5 (lima) tahun berikutnya (2025-2029), yaitu pada fase penyempurnaan (*optimized),* Kota Bontang diharapkan terus berinovasi untuk melengkapi dan menyempurnakan program pembangunan smart city. Baik dalam kesiapan (SDM),

infrastruktur, aplikasi, serta pemanfaatan smart city dalam tata kelola birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

A. Peta Program Kesiapan Smart City

1. Membangun Kesiapan Smart City Kota Bontang

Tabel 1. Roadmap Kesiapan Smart City

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
Suprastruktur	Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanan Bontang Smart City	Perda tentang Pelaksanaan Smart City		
	Kerjasama Smart City Antar Kabupaten/Kota	Kerjasama Smart City Antar Kabupaten/Kota	Kerjasama Smart City Antar Kabupaten/Kota	Kerjasama Smart City Antar Kabupaten/Kota
		Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Smart City Kota Bontang/BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Smart City Kota Bontang/BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	
Infrastruktur	Pemeliharaan jalan pemukiman dan pengembangan pelabuhan			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Pembangunan Gedung Arsip			
	Pembuatan ruang gorong-gorong untuk pemindahan kabel ke bawah tanah *(ducting)*			
	Pembuatan UKS atau IGD di daerah pesisir			
	Penyediaan 5 Fire Station			
	Perpustakaan keliling di pesisir			
Aplikasi	Pembangunan aplikasi pelayanan masyarakat (etc: Smart Infrastruktur, aplikasi yang dapat menyajikan data terbuka) *pembangunan aplikasi dan integrasi aplikasi	Pembangunan dan pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat *pembangunan aplikasi dan integrasi aplikasi (100%)	Pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat *pengembangan aplikasi dan integrasi aplikasi	Pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat *pengembangan aplikasi dan integrasi aplikasi

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	(50%)			
	Membuat Aplikasi Panic button	Membuat Aplikasi Panic button	Membuat Aplikasi Panic button	Membuat Aplikasi Panic button
	embangkan integrasi aplikasi tata kelola birokrasi (E-planning, E-budgeting, E-Monitoring, e-rup (sirup), sinnerji (sistem indikator kinerja individu), e-sakip (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan), dan lain-lain	embangkan integrasi aplikasi tata kelola birokrasi (E-planning, E-budgeting, E-Monitoring, e-rup (sirup), sinnerji (sistem indikator kinerja individu), e-sakip (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan), dan lain-lain	embangkan integrasi aplikasi tata kelola birokrasi (E-planning, E-budgeting, E-Monitoring, e-rup (sirup), sinnerji (sistem indikator kinerja individu), e-sakip (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan), dan lain-lain	embangkan integrasi aplikasi tata kelola birokrasi (E-planning, E-budgeting, E-Monitoring, e-rup (sirup), sinnerji (sistem indikator kinerja individu), e-sakip (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan), dan lain-lain
		Mengembangkan integrasi aplikasi pelayanan publik (perijinan, pengaduan masyarakat).	Mengembangkan integrasi aplikasi pelayanan publik (perijinan, pengaduan masyarakat).	
		Mengembangkan aplikasi SIMPELTARU Kota Bontang	Mengembangkan aplikasi SIMPELTARU Kota Bontang	

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Literasi	Peningkatan Kualitas SDM ASN masyarakat di bidang teknologi	Pengembangan ASN Masyarakat yang 'Melek' Digital	Pengembangan ASN Masyarakat yang 'Melek' Digital	Membudayakan melek digital di ASN masyarakat
	Mensosialisasikan dan bimtek pemanfaatan TIK yang produktif dan bermanfaat			
	Mensosialisasikan dan bimtek pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan skill dan keterampilan guna mendukung program smart city.			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Program sosialisasi dan bimtek internet dan digital masyarakat			
	Melakukan sosialisasi dan bimtek kepada pihak eksternal melalui kegiatan branding dan promosi pembangunan smart city kepada masyarakat, calon investor, kontraktor, pelaku bisnis, kampus dan lain-lain			
	Kegiatan literasi ekonomi digital kepada UMKM, kampus, dan masyarakat luas	Kegiatan literasi ekonomi digital kepada UMKM, kampus, dan masyarakat luas	Kegiatan literasi ekonomi digital kepada UMKM, kampus, dan masyarakat luas	Kegiatan literasi ekonomi digital kepada UMKM, kampus, dan masyarakat luas

2. Membangun Smart City Kota Bontang

Tabel 2. Roadmap Smart City Kota Bontang

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
Smart Governance		Edukasi (bimtek) dan Sosialisasi sistem aplikasi smart governance	Edukasi (bimtek) dan Sosialisasi sistem aplikasi smart governance	Edukasi (bimtek) dan Sosialisasi sistem aplikasi smart governance
	Inventarisir, Assesment & Analisis semua layanan aplikasi yang ada di semua OPD	Edukasi & Sosialisasi penggunaan Layanan ini baik melalui media offline maupun online ke seluruh masyarakat	Edukasi & Sosialisasi penggunaan Layanan ini baik melalui media offline maupun online ke seluruh masyarakat	Monitoring dan evaluasi penerapan layanan
	Pemeliharaan infrastruktur TIK (CCTV dan Bandwidth)	Pemeliharaan infrastruktur TIK (CCTV dan Bandwidth)	Pemeliharaan infrastruktur TIK (CCTV dan Bandwidth)	Pemeliharaan infrastruktur TIK (CCTV dan Bandwidth)
		Penerapan data berbagi pakai	Penerapan data berbagi pakai	
	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi layanan E-Government			
	Desain dan pengembangan layanan sistem informasi			
	Program Pengembangan	Program Pengembangan	Program Pengembangan	Program Pengembangan

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	SDM menuju Smart City	SDM menuju Smart City	SDM menuju Smart City	SDM menuju Smart City
	Penerapan komputasi awan	Penerapan komputasi awan	Penerapan komputasi awan	Penerapan komputasi awan
		Pembangunan Infrastruktur TELCO	Pembangunan Infrastruktur TELCO	
	Pelaksanaan tata kelola TIK			
		pelaksanaan Layanan terintergrasi	pelaksanaan Layanan terintergrasi	
	Pembangunan / Pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis android			
	Pengembangan /Pemeliharaan Aplikasi SIMPEG			
	Pembangunan Aplikasi E-Takah			
	Program Pemeliharaan Aplikasi e-SATU			
		Pengembangan aplikasi	Pengembangan aplikasi	

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
		kepegawaian berbasis android dengan menambahkan fitur e-CUTI, e-ABSENSi dan e-SKP	kepegawaian berbasis android dengan menambahkan fitur e-CUTI, e-ABSENSi dan e-SKP	
	Implementasi Simwasda: • Simwas • Sim HP			
		Membangun klinik pengawasan (forum asistensi) berbasis TI		
	Pembuatan KIA online			
	Anjungan KIA			
				Anjungan Dokumen Kependudukan
	Bimtek SPJ bantuan partai politik			
Smart Branding	Pembuatan logo atau maskot dan tagline	Pengenalan dan promosi pariwisata dalam segala	Pengenalan dan promosi pariwisata dalam segala	Mewujudkan pariwisata yang komprehensif

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	(Misalnya Amazing Katulistiwa)	sector	sektor	
	Penguatan SDM Pariwisata	Penguatan SDM Pariwisata	Penguatan SDM Pariwisata	
	Membuat Promosi terintegrasi online dan offline untuk investasi	Membuat Promosi terintegrasi online dan offline untuk investasi	Membuat Promosi terintegrasi online dan offline untuk investasi	Membuat Promosi terintegrasi online dan offline untuk investasi
	Aktivasi Bontang Tourism Center	Pembuatan aplikasi	Pembuatan aplikasi	
	Replikasi kampung MASDARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan)* Bontang Smart Park Bontang Modena (Modern and Natural) Tourism			
	Pengembangan kegiatan festival wisata maritim			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Kampanye wisata maritim Bontang dengan melibatkan kampus, pokdarwis, dan lain-lain	Mengadakan event wisata nasional	Mengadakan event wisata nasional dan internasional	Penguatan kerjasama promosi wisata dengan pihak nasional dan internasional
	Melaksanakan Logo Sayembara “Ayo Wisata ke Bontang” (Bontang JAGOnya Maritim)	Melaksanakan Logo Sayembara “Ayo Wisata ke Bontang” (Bontang JAGOnya Maritim)	Melaksanakan Logo Sayembara “Ayo Wisata ke Bontang” (Bontang JAGOnya Maritim)	Melaksanakan Logo Sayembara “Ayo Wisata ke Bontang” (Bontang JAGOnya Maritim)
	Mensosialisasikan hasil sayembara melalui media social, media cetak, website dan elektronik			
		Pembangunan jaringan promosi wisata melalui event pameran wisata	Pembangunan jaringan promosi wisata melalui event pameran wisata	
	Penguatan sarana dan prasarana pariwisata (akses jalan dan bangunan dasar)	Pembangunan sarana dan prasarana tambahan (atraksi wisata)	Pembangunan sarana dan prasarana tambahan (atraksi wisata)	Penguatan sarana dan prasarana

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Pembuatan perda pariwisata	Penguatan kelembagaan (badan promosi wisata, kelompok sadar wisata, mitra wisata)	Penguatan kelembagaan (badan promosi wisata, kelompok sadar wisata, mitra wisata)	Pengembangan destinasi wisata
	Membuat tim percepatan pembangunan pariwisata	Melakukan kerjasama promosi wisata	Melakukan kerjasama promosi wisata	Destinasi dan atraksi wisata
	Membuat pusat informasi wisata			
	Membuat Official Sosmed di tiap OPD (fb, ig, Youtube)			
	Pembuatan Aplikasi / website Pokdarwis			
	Membuat Safety Maps (Peta Keselamatan Kota Bontang)			
	Vocal Point Gateway (pembuatan bangunan di setiap pintu gerbang masuk bontang sebagai			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	daya tarik wisatawan)			
	Pembuatan iklan popup kota			
		Pembuatan landmark di tengah laut	Pembuatan landmark di tengah laut	
		Pembangunan Blok Brand Terminal Kilo 6 dan Pasar Telihan	Pembangunan Blok Brand Terminal Kilo 6 dan Pasar Telihan	
		Iklan berbayar via sosmed (promosi)	Iklan berbayar via sosmed (promosi)	
				Peningkatan Kegiatan Usaha Wisata Kuliner
				Pembangunan Lokasi dan sarana wisata kuliner
				Pembinaan dan Pengembangan Wisata Kuliner
Smart Economy	Menyajikan produk-produk unggulan yang berkualitas, bernilai ekonomis, dengan	Pengembangan sentra-sentra perekonomian terpadu kawasan industri dan pengembangan SDM	Pengembangan sentra-sentra perekonomian terpadu kawasan industri dan pengembangan SDM	Pembangunan pariwisata dan industri terpadu yang berwawasan lingkungan

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	kemasan yang menarik dan mudah dalam pemasaran serta sarana yang memadai			
	Uji coba mewujudkan masyrakat less cash melalui transaksi elektronik	Mengembangkan distribusi elektronik terpadu, Pengembangan masyrakat less cash melalui transaksi elektronik	Mengembangkan distribusi elektronik terpadu, Pengembangan transaksi elektronik (less cash) bagi masyrakat.	mewujudkan masyrakat less cash melalui transaksi elektronik secara menyeluruh
	PAD online resto dan rumah makan dipasang real time transaksi box jumlah transaksi sehingga otomatis transparan tidak manual	Peningkatan PAD Online		mewujudkan masyarakat yang cashless secara menyeluruh
	Promosi wisata kuliner			
	Pelatihan manajemen			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	kewirausahaan baru bagi pemuda			
	Pengelolaan parkir yang professional	Pemanfaatan sarana teknologi elektronik untuk memonitor distribusi dan sektor parkir	Pemanfaatan sarana teknologi elektronik untuk memonitor distribusi dan sektor parkir	
	Promosi Produk Asli Bontang melalui Media Sosial dan *E-Commerce*	Promosi Produk Asli Bontang melalui Media Sosial dan *E-Commerce*	Promosi Produk Asli Bontang melalui Media Sosial dan *E-Commerce*	
	Pelatihan / Workshop Produk Bontang (pengolahan, packaging, pemasaran)*			
	Sosialisasi 3R & Pelatihan Pemanfaatan Limbah Industri.	Sosialisasi 3R & Pelatihan Pemanfaatan Limbah Industri.	Sosialisasi 3R & Pelatihan Pemanfaatan Limbah Industri.	Sosialisasi 3R & Pelatihan Pemanfaatan Limbah Industri.

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Program pengendalian inflasi Kota Bontang (Survey dan operasi pasar)	Program pengendalian inflasi Kota Bontang (Survey dan operasi pasar)	Program pengendalian inflasi Kota Bontang (Survey dan operasi pasar)	Program pengendalian inflasi Kota Bontang (Survey dan operasi pasar)
	Blueprint pengembangan kawasan industry			
	Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan	Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan	Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan	Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan
	pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda	pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda	pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda	pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda
	pelatihan/magang bagi pelaku wirausaha muda baru	pelatihan/magang bagi pelaku wirausaha muda baru	pelatihan/magang bagi pelaku wirausaha muda baru	pelatihan/magang bagi pelaku wirausaha muda baru
	Gelar UKM Fair di UKM Center setiap minggu pertama setiap bulannya	Gelar UKM Fair di UKM Center setiap minggu pertama setiap bulannya	Gelar UKM Fair di UKM Center setiap minggu pertama setiap bulannya	Gelar UKM Fair di UKM Center setiap minggu pertama setiap bulannya
	Mengikuti pameran dalam dan luar daerah promosi	Mengikuti pameran dalam dan luar daerah promosi	Mengikuti pameran dalam dan luar daerah	Mengikuti pameran dalam dan luar daerah

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	publikasi	publikasi	promosi publikasi	promosi publikasi
	Promosi produk local melalui media cetak dan TV Lokal dan social media	Promosi produk local melalui media cetak dan TV Lokal dan social media	Promosi produk local melalui media cetak dan TV Lokal dan social media	Promosi produk local melalui media cetak dan TV Lokal dan social media
	fasilitasi penguatan modal usaha oleh dana bergulir	fasilitasi penguatan modal usaha oleh dana bergulir	fasilitasi penguatan modal usaha oleh dana bergulir	fasilitasi penguatan modal usaha oleh dana bergulir
	fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro	fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro	fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro	fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro
	bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro (peralatan, gerobak, desain toko/desain lapak, desain kemasan)	bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro (peralatan, gerobak, desain toko/desain lapak, desain kemasan)	bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro (peralatan, gerobak, desain toko/desain lapak, desain kemasan)	bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro (peralatan, gerobak, desain toko/desain lapak, desain kemasan)
	perencanaan pengembangan pasar bontang lestari	perencanaan pengembangan pasar bontang lestari	perencanaan pengembangan pasar bontang lestari	perencanaan pengembangan pasar bontang lestari
	pengadaan alat penunjang	pengadaan alat penunjang	pengadaan alat penunjang	pengadaan alat penunjang

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	kebersihan pasar	kebersihan pasar	kebersihan pasar	kebersihan pasar
	fasilitasi program pengembangan one village one product	fasilitasi program pengembangan one village one product	fasilitasi program pengembangan one village one product	fasilitasi program pengembangan one village one product
	fasilitasi pengembangan produk unggulan	fasilitasi pengembangan produk unggulan	fasilitasi pengembangan produk unggulan	fasilitasi pengembangan produk unggulan
	Pembuatan Fasilitasi Startup Fintech			
	Upgrading SIMPATDA (Pelaporan pajak)			
	E- STTPD (pembayaran online)			
	E- Billing (pembayaran online)			
	Bantuan Cash Register (pelaporan)			
		E-PBB Kemudahan Pelayanan	E-PBB Kemudahan Pelayanan	
		E-BPHTB Kemudahan Pelayanan	E-BPHTB Kemudahan Pelayanan	

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Membangun industri maritim terpadu mulai dari hulu (penangkapan dan budidaya ikan), penyimpanan, pengolahan ikan hingga pemasaran ikan dan rumput laut.			
Smart Living	Membangun sistem Informasi kebutuhan donor darah di Kota Bontang			
	Melengkapi sarana dan prasarana serta tenaga medis bidang kesehatan	Melengkapi sarana dan prasarana serta tenaga medis bidang kesehatan	Melengkapi sarana dan prasarana serta tenaga medis bidang kesehatan	Melengkapi sarana dan prasarana serta tenaga medis bidang kesehatan
	Penyediaan kendaraan umum yang memadai bagi anak sekolah dan pekerja (10%)	Penyediaan kendaraan umum yang memadai sebesar 50%	Penyediaan kendaraan umum yang memadai sebesar 50%	Tersedianya TransBontang (bis)

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
		Pengadaan alat pendeteksi banjir dan early warning system	Pengadaan alat pendeteksi banjir dan early warning system	Pengadaan alat pendeteksi banjir dan early warning system
	Pembangunan ruang tebuka untuk anak (taman kreasi)	Pembangunan ruang tebuka untuk anak (taman kreasi) (100%)	Pembangunan ruang tebuka untuk anak (taman kreasi) (100%)	Pembangunan ruang tebuka untuk anak (taman kreasi) (100%)
	Pembangunan gedung pertunjukan budaya	Pembangunan gedung pertunjukan budaya	Pembangunan gedung pertunjukan budaya	
	Pengadaan TransBontang (bis)	Pengadaan TransBontang (bis)	Pengadaan TransBontang (bis)	Pengadaan TransBontang (bis)
	Pagelaran Budaya Nusantara	Pagelaran Budaya Nusantara	Pagelaran Budaya Nusantara	Pagelaran Budaya Nusantara
	Pengadaan alat deteksi kebocoran jaringan gas (jargas)	Pengadaan alat deteksi kebocoran jaringan gas (jargas)	Pengadaan alat deteksi kebocoran jaringan gas (jargas)	Pengadaan alat deteksi kebocoran jaringan gas (jargas)
	Pengembangan pusling (puskesmas keliling: kapal di laut)	Pengembangan pusling (puskesmas keliling: kapal di laut)	Pengembangan pusling (puskesmas keliling: kapal di laut)	Pengembangan pusling (puskesmas keliling: kapal di laut)
	Sosialisasi Peraturan Ketatarruangan	Sosialisasi Peraturan Ketatarruangan		
	Program percepatan	Program percepatan		

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	perizinan pemanfaatan ruang	perizinan pemanfaatan ruang		
		Membangun sistem informasi kesehatan terpadu (mulai pendaftaran, antrian, rekam medik, gawat darurat, kamar kosong, emergency care, dsb)	Membangun sistem informasi kesehatan terpadu (mulai pendaftaran, antrian, rekam medik, gawat darurat, kamar kosong, emergency care, dsb)	
	Program rujukan (Penyatuan / bridging system BPJS dengan Kemenkes)	Program rujukan (Penyatuan / bridging system BPJS dengan Kemenkes)	Program rujukan (Penyatuan / bridging system BPJS dengan Kemenkes)	Program rujukan (Penyatuan / bridging system BPJS dengan Kemenkes)
Smart Society	Membuat smart apps “Masyarakat Peduli Sosial” (membuat jaringan aplikasi donasi online) /super apps donasi online			
	Membangun sistem keamanan tingkat RT (penyediaan CCTV)	Sistem keamanan terintegrasi tingkat kecamatan (penyediaan	terintegrasi tingkat kecamatan (penyediaan CCTV)	Sistem keamanan terintegrasi tingkat kota (penyediaan

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
		CCTV)		CCTV)
	Mengembangkan pendidikan (SD, SMP, SMA) dengan kualitas internasional di Kota Bontang	Mengembangkan pendidikan (SD, SMP, SMA) dengan kualitas internasional di Kota Bontang	Mengembangkan pendidikan (SD, SMP, SMA) dengan kualitas internasional di Kota Bontang	Mengembangkan pendidikan (SD, SMP, SMA) dengan kualitas internasional di Kota Bontang
	Pengembangan Geo Spasial	Integrasi data antar OPD terkait	Integrasi data antar OPD terkait	Membuat sistem informasi mengenai data penduduk
	Membangun ekosistem sistem penanggulangan bencana terpadu	Pengembangan ekosistem sistem penanggulangan bencana terpadu	Pengembangan ekosistem sistem penanggulangan bencana terpadu	Pengembangan ekosistem sistem penanggulangan bencana terpadu
	Membangun asrama singgah untuk anak pesisir			
	Membangun sistem informasi data kependudukan dan social terintegrasi dengan SuperApps	Membangun sistem informasi data kependudukan dan social terintegrasi dengan SuperApps	Membangun sistem informasi data kependudukan dan social terintegrasi dengan SuperApps	Membangun sistem informasi data kependudukan dan social terintegrasi dengan SuperApps
	Membuat layanan sosial terpadu online			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk menolong terwujudnya masyarakat pembelajar			
		Pembangunan Rehabilitasi Ex – ODGJ	Pembangunan Rehabilitasi Ex – ODGJ	
		Membangun Integrasi Big Data Sosial	Membangun Integrasi Big Data Sosial	
				Pembangunan Balai Rehabilitasi Sosial
Smart Environtment	Pelatihan pembuatan kompos, biopori, dan daur ulang sampah	Pembangunan TPST minimlah di setiap kelurahan ada 1 TPST	Pembangunan TPST minimlah di setiap kelurahan ada 1 TPST	Meningkatkan kapasitas dan teknologi di TPST.
		Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah	Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah	Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah
	Gerakan mengendalikan sampah plastik.	Pengurangan penggunaan sampah plastik.	Pengurangan penggunaan sampah plastik.	Tidak menggunakan sampah plastik.
	Penanaman pohon dan pembuatan sumur injeksi.	Pembuatan peraturan tata kelola penggunaan air tanah dan menambah	Pembuatan peraturan tata kelola penggunaan air tanah dan menambah	Melakukan studi kelayakan sistem desalinasi

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
		jumlah lokasi RTH	jumlah lokasi RTH	
	Menggalakan kegiatan *Car Free Day* dengan menambah titik lokasi dan waktu.	Menggalakan kegiatan *Car Free Day* dengan menambah titik lokasi dan waktu.		
	Membuat peraturan tetang pembatasan penggunaan kerdaraan bermotor dibawah 1 Kilo.			
	Pengadaan transportasi massal dengan menggunakan tenaga listrik	Pengadaan transportasi massal dengan menggunakan tenaga listrik	Pengadaan transportasi massal dengan menggunakan tenaga listrik	Menggunakan transportasi massal dengan menggunakan tenaga listrik.
	Perbaikan insfrastruktur transportasi	Pemasangan lampu solar cell dan LED jalan dan rumah tangga	Pemasangan lampu solar cell dan LED jalan dan rumah tangga	
	Penerapan dan pemberian sanksi yang melanggar aturan			
				Penyediaan Fire Tag Boat
	Pelatihan dan perekrutan			

Dimensi Kesiapan Smart City	Jangka Pendek	Jangka Menengah		Jangka Panjang
	Tahap 1 Permulaan	Tahap 2 Pembangunan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
	2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2029
	tenaga pesisir sebagai tenaga penolong pertama			

B. Kertas Kerja Program Kesiapan Smart City

1. Rencana Pembangunan Suprastruktur Pendukung *Smart City*.

Tabel 3. Kertas Kerja Suprastruktur

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanan Bontang Smart City	Penegakkan Peraturan Perundangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Adanya Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Bontang Smart City.	-	-	Pemkot Bontang	-	2020
Perda tentang Pelaksanaan Smart City		Adanya Perda Tentang	-	-	Pemkot Bontang	-	2021 - 2022

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		Pelaksanaan Smart City					
Kerjasama Smart City Antar Kabupaten/Kota		Terbentuknya Perjanjian Kerjasama Smart City Antar Kota/ Kabupaten	-	-	Pemkot Bontang	-	2020 - 2029
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Smart City Kota Bontang		Adanya Unit Pelaksana Teknis Smart City Kota Bontang	-	-	Pemkot Bontang	-	2021 - 2024

2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*.

Tabel 4. Kertas Kerja Infrastruktur

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pemeliharaan jalan pemukiman dan pengembangan pelabuhan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Jalanan pemukiman menjadi terstruktur, bersih, dan aman serta pelabuhan menjadi luas, tersturktur, dan majunya perekonomian wilayah pelabuhan .	3M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2020
Pembangunan Gedung Arsip	Program pembangunan sarana dan prasarana kearsipan	Terlaksananya pembangunan ruang Depo Arsip Daerah	4,5 M	APBD	DPK	PUPR	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pembuatan ruang gorong-gorong untuk pemindahan kabel ke bawah tanah (ducting)		Tersedianya Ruang Gorong - gorong	1M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2020
Pembuatan uks atau igd di daerah pesisir		Tersedianya UKS dan IGD di daerah Pesisir	5M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Dinas Kesehatan	Pemerintah Kota Bontang dan Dinas Kesehatan	2020
Penyediaan 5 Fire Station	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Terbangunnya 5 fire station	37,5 M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2020
Perpustakaan keliling pesisir	Program Pegembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Tersedianya Perpustakaan Keliling Pesisir	300Jt	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Dinas	Pemerintah Kota Bontang dan	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
	Perpustakaan				Pendidikan	Dinas Pendidikan	

3. Rencana Pembangunan Aplikasi Pendukung *Smart City*.

Tabel 5. Kertas Kerja Aplikasi

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pembangunan aplikasi dan integrasi pelayanan masyarakat (etc: Smart Infrastruktur, aplikasi yang dapat menyajikan data terbuka)		Tersedianya Aplikasi dan Integrasi Pelayanan Masyarakat	500jt	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Diskominfo	Pemerintah Kota Bontang dan Diskominfo	2020-2029
Membuat Aplikasi Panic button		Tersedianya Aplikasi Panic Button	200Jt	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan	Pemerintah Kota Bontang dan	2020 - 2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
					Diskominfo	Diskominfo	
Mengembangkan integrasi aplikasi tata kelola birokrasi (*E-planning*, *E-budgeting*, *E-Monitoring*, e-rup (sirup), sinnerji (sistem indikator kinerja individu), e-sakip (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan), dan lain-lain		Tersedianya Super Apps 1 pintu untuk tata kelola birokrasi	1M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Diskominfo	Pemerintah Kota Bontang dan Diskominfo	2020 - 2029
Mengembangkan integrasi aplikasi pelayanan publik		Tersedianya Aplikasi Pelayanan Publik 1 Pintu	300JT	APBD	Diskominfo	-	2021-2024

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
(perijinan, pengaduan masyarakat).							
Membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		Tersedianya system Informasi Geospasial yang Terintegrasi					2020-2029

4. Rencana Pembangunan Literasi Pendukung *Smart City*.

Tabel 6. Kertas Kerja Literasi

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas SDM ASN masyarakat di bidang teknologi		Kualitas SDM dan ASN yang Melek Digital	150 Juta	APBD	Diskominfo	-	2020 - 2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Mensosialisasikan dan bimtek pemanfaatan TIK yang produktif dan bermanfaat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	Kualitas SDM ASN Meningkat	150 Juta	APBD	Diskominfo	-	2020
Mensosialisasikan dan bimtek pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan skill dan keterampilan guna mendukung program *smart city*.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Kualitas SDM ASN Meningkat	150 Juta	APBD	Diskominfo	-	2020
Program sosialisasi dan bimtek internet dan digital masyarakat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Masyarakat yang melek digital	150Juta	APBD	Diskominfo	Dinas Pendidikan	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
	Informasi Komunikasi						
Melakukan sosialisasi dan bimtek kepada pihak eksternal melalui kegiatan *branding* dan promosi pembangunan *smart city* kepada masyarakat, calon investor, kontraktor, pelaku bisnis, kampus dan lain-lain	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	Terwujudnya kegiatan Branding Smart City	200 Juta	APBD	DPMPTSP	Diskominfo, Dinas Pariwisata	2020
Kegiatan literasi ekonomi digital kepada UMKM, kampus, dan masyarakat luas		UMKM Kampus,dan Masyarakat yang melek akan ekonomi digital	150 Juta	APBD	Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan	Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo	2021-2024

C. Kertas Kerja Pembangunan Smart City

1. Smart Governance

Tabel 7. Kertas Kerja Smart Governance

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pemeliharaan infrastruktur TIK (CCTV dan Bandwidth)		Tersedianya perangkat TIK, bandwidth yang memadai, dan perangkat CCTV	5 M / tahun	APBD, APBN, dan sharing cost	Diskominfo	Semua OPD, Provider, perbankan	2020 - 2029
Penerapan data berbagi pakai		Tersedianya satu data berbagi pakai dan aturan berbagi pakai (interna dan eksternal)	1 M	APBN	Diskominfo	Semua opd	2021-2024
Monitoring dan	Program	1. Tersedianya	750 jt	APBD dan	Diskominfo	Diskominfo	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi layanan E-Government	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	data layanan aplikasi 2. Jumlah masyarakat yang paham 3. Tersediany a pedoman manajeme n resiko TIK		APBN		dan masyarakat	
Desain dan pengembangan layanan sistem informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	1. Tersedianya dashboard EIS 2. Tersedianya sistem informasi bagi mayarakat	100 jt	APBD	Diskominfo	Diskominfo	2020
Program		1. Jumlah	850 jt / tahun	APBD	Diskominfo	Diskominfo,	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pengembangan SDM menuju Smart City		masyarakat yang paham pada sosialisai layanan system informasi 2. Jumlah ASN yang menguasai layanan system informasi				masyarakat dan OPD terkait	
Penerapan komputasi awan		Tersedianya data cadangan	1 M / tahun	APBD	Diskominfo	Diskominfo dan OPD terkait	2020- 2029
Pembangunan Infrastruktur TELCO		Tersedianya jaringan data berbasis fiber optic dan radio	20 M	APBD	Diskominfo	Diskominfo dan provider	2021-2024

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		wireless sesuai kapasitas yang diinginkan					
Pelaksanaan tata kelola TIK	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	Tersedianya rekomendasi hasil audit	400jt	APBD	Diskominfo	OPD terkait	2020
pelaksanaan Layanan terintergrasi		1. Terintegrasinya seluruh layanan aplikasi OPD ke Diskominfo 2. Tersedianya aplikasi layanan terpadu	800 jt	APBD	Diskominfo	Diskominfo dan OPD terkait	2021-2024
Pembangunan /	Program	Tersedianya	50jt	APBD	BKPSDM	Diskominfo	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis android	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	aplikasi					
Pengembangan /Pemeliharaan Aplikasi SIMPEG	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya aplikasi	50jt	APBD	BKPSDM	Diskominfo	2020
Pembangunan Aplikasi E-Takah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya aplikasi	50jt	APBD	BKPSDM	Diskominfo	2020
Program Pemeliharaan Aplikasi e-SATU	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya aplikasi	50jt	APBD	BKPSDM	Diskominfo	2020
Pengembangan aplikasi		Tersedianya	100jt	APBD	BKPSDM	Diskominfo	2021 - 2024

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
kepegawaian berbasis android dengan menambahkan fitur e-CUTI, e-ABSENSi dan e-SKP		aplikasi				dan Konsultan	
Implementasi simwasda: • Simwas • Sim HP	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemenuhan kebutuhan terhadap system yang mendukung pelaksanaan pengawasan daerah berbasis tik	174jt	APBD	Pihak ke 3	Diskominfo	2020
Membangun klinik pengawasan (forum asistensi) berbasis TI	Informasi	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang	250jt	APBD	Phak ke 3	Diskominfo	2022

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		berlaku					
Sistem Aplikasi Birokrasi Terpadu: - Paperless Mempersingkat waktu	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 pintu kepengurusan KK, KTP, SKCK, dll	100jt	APBD	Kelurahan	Semua OPD	2020
Pembuatan KIA online	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penerbitan KIA	50jt	APBD	Capil	Kecamatan	2020
Anjungan KIA		Meningkatnya penerbitan KIA	200jt	APBD	Capil	Kecamatan	2021 - 2024
Anjungan Dokumen Kependudukan		Kepemilikan dokumen kependudukan	200jt	APBD	Capil	Kominfo	2025 - 2029
Bimtek SPJ bantuan partai politik		Berkurangnya termuan	150jt	APBD	Kesbangpol	Kecamatan	2020
Edukasi (bimtek) dan Sosialisasi sistem aplikasi smart governance		Terwujudnya Pemerintahan Yang Pintar dan Efisien	150jt	APBD	Diskominfo	Pemkot Bontang	2020 - 2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Inventarisir, Assesment & Analisis semua layanan aplikasi yang ada di semua OPD		Terwujudnya Penyokong Kinerja seluruh OPD yang tepat guna dan berkualitas	150jt	APBD	Diskominfo	Seluruh OPD	2020 - 2029

2. Smart Branding

Tabel 8. Kertas Kerja Smart Branding

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Melaksanakan Logo Sayembara “Ayo Wisata ke Bontang” (Bontang	Program Pengembangan Pemasaran	Terciptanya logo “Ayo Wisata Ke	150 juta	1. APBD	Dispopar	Disdik, Kominfo , dan	2020-2021

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
JAGOnya Maritim)	Pariwisata	Bontang"				Swasta	
Sosialisasi Sayembara Logo "Ayo Wisata ke Bontang"		Terlaksananya sosialisasi	200jt	1. CSR Perusahaan 2. Pemerintah Kota Bontang 3. APBN	Perusahaan, Pemerintah Kota Bontang, dan Pemerintah Provinsi.	Kelompok masyarakat, Pemerintah, dan pihak perusahaan	1 thn
Penguatan SDM Pariwisata		1. Jumlah wisatawan meningkat. 2. Meningkatnya PAD. 3. Meningkatnya penghasilan masyarakat.	250 M	1. APBD 2. APBN 3. CSR Perusahaan 4. Pemerintah Kota Bontang 5. Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Perusahaan.	Pemerintah Provinsi dan Perusahaan	3 tahun
Membuat Promosi		Terwujudnya	500jt	APBD	DPMPTSP	Diskominfo	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
terintegrasi online dan offline untuk investasi		promosi daerah terintegrasi berbasis online dan offline					
Penguatan sarana dan prasarana pariwisata (akses jalan dan bangunan dasar)		1. Jumlah wisatawan meningkat. 2. Meningkatnya PAD. 3. Meningkatnya penghasilan masyarakat.	50 M	APBD	Dispopar ,PU	Semua Dinas	4 Tahun
Pembuatan perda pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terbentuknya Perda Pariwisata	100jt	APBD	Dispopar	Semua dinas	2020
Membuat tim percepatan pembangunan pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran	Terlaksananya pembangunan pariwisata	-	APBD	Dispopar	Semua Dinas	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
	Pariwisata						
Membuat pusat informasi wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah wisatawan meningkat. 2. Meningkatnya PAD. 3. Meningkatnya penghasilan masyarakat.	300jt	APBD	Dispopar	Dinas PU	2020
Pengembangan kegiatan wisata beras basah*	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Festival snorkelling dan diving, Festival Laut	600jt	APBD	Dispopar	CSR	1 thn
Pengembangan kegiatan festival wisata maritim	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Perekonomian Maritim	1M	CSR, APBD, SWASTA	Dinas Pariwisata, DPMPTSP	Swasta, Masyarakat	2020
Kampanye wisata maritim Bontang dengan	Program Pengembangan	Terlaksananya Wisata Maritim	150jt	APBD	Dinas Pariwisata	Masyarakat,	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
melibatkan kampus, pokdarwis, dan lain-lain	Pemasaran Pariwisata					Dinas Kominfo, DPMPTSP, Dinas Pendidikan	
Mengadakan event wisata nasional dan internasional		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	350jt	APBD	Dinas Pariwisata	Masyarakat, Dinas Kominfo, DPMPTSP, Dinas Pendidikan	2021-2024
Meningkatkan kerjasama promosi wisata dengan		Meningkatnya Kunjungan	-	-	Dinas Pariwisata	-	2025 - 2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
pihak nasional dan internasional		Wisatawan					
Aktivasi Tourism Center di Kawasan Wisata Bontang Koala	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah wisatawan meningkat. 2. Meningkatnya PAD. 3. Meningkatnya penghasilan masyarakat.	200j	APBD	Dispopar	Semua Dinas	1 thn
Pembuatan Logo Kota	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Logo digunakan secara nasional dan internasional 2. Menarik wisatawan domestik dan internasional	500jt	APBD	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Perusahaan UMKM	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Perusahaan UMKM	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		3. Logo digunakan pada kemasan oleh –oleh khas kota Bontang					
Official Sosmed di tiap OPD (fb, ig, Youtube)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Branding masing masing OPD 2. Pengaduan Via Sosmed 3. Promosi Event Pariwisata	-	APBD	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Perusahaan UMKM	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Perusahaan UMKM	2020
Pembuatan Aplikasi / website Pokdarwis	Tata Kelola Destinasi	Pengguna mempunyai informasi fasilitas destinasi (lebih aman, lebih	300jt	• APBD • DAKNON Fisik	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	POLNES, SMD, PEMDA, dan KEMENTRIAN	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		bersih, sejuk, tertib, ramah, indah) dan Mempunyai paket wisata Menjual produk local pordarwis					
Membuat Safety Maps (Peta Keselamatan Kota Bontang)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tersedianya Produk	200jt	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2020
Vocal Point Gateway (pembuatan bangunan di setiap pintu gerbang masuk bontang sebagai daya tarik wisatawan)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terbangunnya bangunan di setiap pintu gerbang masuk kota Bontang	3M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2020
Pembuatan iklan popup	Program	Terciptanya	200jt	APBD	Pemerintah	Pemerintah	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
kota	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	ikaln popup pada saat membuka website kota Bontang			Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	
Pembuatan landmark di tengah laut		Terbangunnya ikon monumental yang dikenal luas	10M	APBN	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2021-2024
Pembangunan Blok Brand Terminal Kilo 6 dan Pasar Telihan		Terbangunnya blok brand	10M	APBD/APBN	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Kementrian	2021 - 2024
Iklan berbayar via sosmed (promosi)		Menjangkau pasar nasional /	10M	APBD	Pemerintah Kota	Pemerintah Kota	2021 - 2024

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		internasional Promosi event pariwisata tertentu			Bontang dan Pemerintah Provinsi	Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Kementrian	
Peningkatan Kegiatan Usaha Wisata Kuliner		Meningkatnya kunjungan wisata	500jt	APBD dan Swadaya	Masyarakat	Pemkot dan perusahaan	2025 - 2029
Pembangunan Lokasi dan sarana wisata kuliner		Meningkatnya kunjungan wisata	2M	APBD dan Swadaya	Masyarakat	Pemkot dan perusahaan	2025 - 2029
Pembinaan dan Pengembangan Wisata Kuliner		Meningkatnya kunjungan wisata	2M	APBD dan Swadaya	Masyarakat	Pemkot dan perusahaan	2025 - 2029

3. Smart Economy

Tabel 9. Kertas Kerja Smart Economy

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Blueprint pengembangan kawasan industry	Program Pengembangan	Tertatanya bontang lestari sebagai kawasan industry baru	500 JUTA	APBD II	BAPELITBANG	SWASTA dan DPUPR	2020
Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam berwirausaha	50 Jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029
pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam berwirausaha	50 Jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029
pelatihan/magang bagi pelaku wirausaha muda baru		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam berwirausaha	100 Jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro (peralatan, gerobak, desain toko/desain lapak, desain kemasan)		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam berwirausaha	5 M	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029
Gelar UKM Fair di UKM Center setiap minggu pertama setiap bulannya		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam berwirausaha	100 jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029
Mengikuti pameran dalam dan luar daerah promosi publikasi		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam berwirausaha	200 jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029
melalui media cetak dan TV Lokal dan social media		Meningkatnya persentase pelaku usaha dalam	240 jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	Asik dan asmami	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		berwirausaha					
fasilitasi penguatan modal usaha oleh dana bergulir		Pengusaha mikro kecil dan menengah semakin berdaya saing	5 M	APBD I dan APBD II	DKUKMP	UKM dan BPR	2020-2029
fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro		Pengusaha mikro kecil dan menengah semakin berdaya saing	100 jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	UKM dan BPR	2020-2029
perencanaan pengembangan pasar bontang lestari		Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha	200 jt	APBD I dan APBD II	Bapelitbang	DKUKMP dan PUPR	2020-2029
pengadaan alat penunjang		Memberikan	50 jt	APBD I dan	Bapelitbang	DKUKMP	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
kebersihan pasar		kemudahan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha		APBD II		dan PUPR	
fasilitasi program pengembangan one village one product		Jumlah sarana dan prasarana yang representatif	100 jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	DPMPTSP	2020-2029
fasilitasi pengembangan produk unggulan		Jumlah sarana dan prasarana yang representatif	50 jt	APBD I dan APBD II	DKUKMP	DPMPTSP	2020-2029
Pembuatan Fasilitasi Startup Fintech	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya lapangan kerja baru dari fasilitas tersebut	5M	APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	2020
Upgrading SIMPATDA (Pelaporan pajak)	Program Peningkatan	Meningkatnya PAD	92jt	APBD	Bapenda	Bank Daerah	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
E- STTPD (pembayaran online)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya PAD	118jt	APBD	Bapenda	Bank Daerah	2020
E- Billing (pembayaran online)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya PAD	110jt	APBD	Bapenda	Bank Daerah	2020
Bantuan Cash Register (pelaporan)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya PAD	100jt	APBD	Bapenda	Bank Daerah	2020
E-PBB Kemudahan Pelayanan		Meningkatnya PAD	200jt	APBD	Bapenda	Bank Daerah	2021 - 2024

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
E-BPHTB Kemudahan Pelayanan		Meningkatnya PAD	100jt	APBD	Bapenda	Bank Daerah	2021 – 2024
Pengembangan sentra-sentra perekonomian terpadu kawasan industri dan pengembangan SDM		Meningkatnya Perekonomian Kawasan Industri	2M	APBD	Pemkot Bontang	Swasta	2020-2029
Uji coba mewujudkan masyrakat less cash melalui transaksi elektronik	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya Masyarakat Less Cash	150jt	APBD	Pemkont Bontang	Swasta	2020
Mengembangkan distribusi elektronik terpadu, Pengembangan masyrakat less cash melalui transaksi elektronik dan Pengembangan transaksi elektronik (less cash) bagi masyrakat		Terwujudnya Masyarakat Less Cash	500jt	APBD	Diskominfo	OPD Terkait dan Swasta	2021-2029
Replikasi kampung		Terwujudnya	500jt	CSR, APBD	Dinas	Masyaraka	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
MASDARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan)* Bontang Smart Park Bontang Modena (Modern and Natural) Tourism		Kampung – Kampung yang kreatif dan berkarakter			Pariwisata	t	
Peningkatan PAD Online		Meningkatnya PAD	-	-	OPD terkait	Masyaraka t	2020-2029
Pemanfaatan sarana teknologi elektronik untuk memonitor distribusi dan sektor parkir		Memajukan kualitas dan perekonomian Sektor Parkir	150jt	APBD	Diskominfo	-	2020-2024
Promosi Produk Asli Bontang melalui Media Sosial dan *E-Commerce*		Meningkatnya Produksi Produk Asli Bontang	200jt	APBD, CSR	Dinas Koperasi UMKM & Sentra Perdagangan	Masyaraka t	2020-2024
Sosialisasi 3R & Pelatihan Pemanfaatan Limbah		Berkurangnya Pencemaran	150jt	APBD	Dinas Lingkungan	Masyaraka t	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indikator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Industri.		Lingkungan di Wilayah Industri					
Program pengendalian inflasi Kota Bontang (Survey dan operasi pasar)		Terbentuknya daftar harga yang real time	300jt	APBD	Dinas bidang perekonomian dan Dinas Koperasi UMKM & Sentra Perdagangan	Masyarakat	2020-2029
Promosi Wisata Kuliner	Program pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Wisata Kuliner	150jt	APBD	Dinas Pariwisata	Masyarakat	2020
Membangun industri maritim terpadu mulai dari hulu (penangkapan dan budidaya ikan), penyimpanan, pengolahan ikan hingga pemasaran ikan dan rumput laut.		Terwujudnya Industri Maritim yang Terpadu	5M	APBD	Dinas Perindustrian	Swasta	2022

4. Smart Living

Tabel 10. Kertas Kerja Smart Living

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Membangun sistem informasi kebutuhan donor darah di Kota Bontang (online)		Terpenuhinya kebutuhan darah di Kota Bontang	500 JT/tahun	APBD	Dinkes	Kominfo, PMI, dan Rumah Sakit	2020-2029
Membangun sistem informasi kesehatan terpadu (mulai pendaftaran, antrian, rekam medik, gawat darurat, kamar kosong, emergency care, dsb)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	500JT/tahun	APBD/BUMD	Dinkes	Dinkes, kominfo, Rumah sakit, dan puskesmas	2020-2024
Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga medis		Tersedianya alat-alat medis dan tenaga medis	20 M	APBN dan APBD	Dinkes	Rumah sakit	2020-2029
Pengadaan TransBontang (bis)		Tersedianya angkutan umum untuk anak sekolah dan	10 M	CSR dan APBD	BUMD	PUPR, Dishub, Bapelitbang, dan	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
		pekerja				Kepolisian	
Pembangunan ruang tebuka untuk anak (taman kreasi)		Tersedianya taman bermain dan taman pintar untuk anak	30 M	APBD	PUPR	Perkim, BLH, DPKPP, Kelurahan, dan Kecamatan	2021-2029
Pengadaan alat pendeteksi banjir dan early warning system		Terpenuhinya informasi adanya ancaman banjir	1 M	APBD	PUPR	BPBD	2021-2029
Pembangunan gedung pertunjukan budaya		Tersedianya wadah untuk menyalurkan, menampilkan bakat budaya nusantara	50 M	APBD	Disdikbud	PUPR, Sekda (Bagian pemerintahan dan paguyuban)	2020-2024
Pagelaran Budaya Nusantara		Pengembangan budaya Menyediakan hiburan berbasis budaya	1 M/tahun	APBD, CSR, dan sponsorsip	Dispopar	Komunitas budaya dan paguyuban	2020-2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pengadaan alat deteksi kebocoran jaringan gas (jargas)		Berkurangnya kebakaran akibat kebocoran gas	10M	BUMD	Swasta	Perkim	2020 - 2029
Pengembangan pusling (puskesmas keliling: kapal di laut)		menurunnya angka mortalitas dan morbiditas Memudahkan akses pelayanan kesehatan	4M/Tahun	DAK, CSR, dan Perusahaan	Puskesmas (dinkes)	Dinas Kesehatan, Kelurahan, dan kader terlatih	2020 - 2024
Program rujukan (Penyatuan / bridging system BPJS dengan Kemenkes)		Terpenuhinya bridging data BPJS dengan Kemenkes	-	-	Dinas Kesehatan	BPJS dan Kementrian Kesehatan	2020 - 2029
Sosialisasi Peraturan Ketatarruangan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terbentuknya komunitas Bontang PETARUNG (Peduli Tata Ruang)	200jt	APBD	PUPR	Bapelitbang	2020 - 2021
Program percepatan	Program	Tersedianya	100jt	APBD	PUPR	Kominfo	2020 - 2021

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
perizinan pemanfaatan ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	sarana pengesahan rekomendasi dari Kepala OPD					
Membangun sistem informasi kesehatan terpadu (mulai pendaftaran, antrian, rekam medik, gawat darurat, kamar kosong, emergency care, dsb)		Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan terpadu	300jt	APBD	Diskominfo	Dinas Kesehatan	2021-2024
Penyediaan kendaraan umum yang memadai bagi anak sekolah dan pekerja		Terwujudnya kemudahan dalam transportasi umum bagi masyarakat	10M		Dinas Perhubungan / Pemkot Bontang	Swasta / Masyarakat	2020-2029

5. Smart Society

Tabel 11. Kertas Kerja Smart Society

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Mengembangkan pendidikan (SD, SMP, SMA) dengan kualitas internasional di Kota Bontang		Tersedianya sarana prasarana, SDM, pengajar berstandar internasional	10M	APBD dan CSR	Disdikbud	Pemerintah Provinsi	2020-2029
Membangun asrama singgah untuk anak pesisir	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedia sarana prasarana tempat tinggal sementara dan fasilitas pendidikan bagi anak pesisir	20 M	APBD	Disdikbud	BUMN, Perkim, PUPR,dan DPKPP	2020
Membangun sistem informasi data kependudukan dan social terintegrasi dengan SuperApps		Tersedianya informasi lengkap mengenai penduduk dan informasi sosial	1M	APBD	Dispenduk capil	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan, DPMPTSP, dan Bapenda	2020-2029
Membuat layanan sosial terpadu online	Program pelayanan dan	Terlayaninya pelayanan sosial	200jt	APBD	DSPM	Kominfo	2020

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
	rehabilitasi	pada masyarakat					
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk menolong terwujudnya masyarakat pembelajar	Program pengembangan budaya baca dan pembudayaan perpustakaan	Jumlah pengunjung masyarakat	210jt	APBD	DPK	Dinas Pendidikan	2020
Pembangunan Rehabilitasi Ex – ODGJ		Ex-ODGJ dapat diterima oleh keluarga masyarakat	1M	APBD	DSPM	PUPR	2021-2023
Membangun Integrasi Big Data Sosial		Terintegrasinya data sosial dengan instansi terkait	300jt	APBD	DSPM	Kominfo,Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kelurahan, dan kecamatan	2021-2024
Pembangunan Balai Rehabilitasi Sosial		Terbangunnya Balai Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	1M	APBD	PUPR	DSPM, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan.	2025-2028

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Membangun sistem keamanan yang terintegrasi (penyediaan CCTV)		Terwujudnya Sistem Keamanan yang terintegrasi	500jt	APBD	Diskominfo	-	2020-2029
Pengembangan Geo Spasial		Geo Spasial terpadu dan termutakhir	300jt	APBD	Diskominfo	OPD Terkait	2020-2029
Membangun ekosistem sistem penanggulangan bencana terpadu		Terwujudnya penanggulangan bencana yang terpadu	500jt	APBD	Diskominfo	BNPB	2020-2029

6. Smart Environment

Tabel 12. Kertas Kerja Smart Environment

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pelatihan pembuatan kompos.	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Hasil produksi kompos meningkat.	300JT	APBD	Kelurahan terkait	DLH, CSR, Kecamatan, dan Masyarakat setempat	2020 – 2021
Pelatihan pembuatan biopori.	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Menghasilkan pupuk organik (Kompos)	600JT	APBD	Kelurahan terkait	DLH, CSR, Kecamatan, dan Masyarakat setempat	2020 – 2021
Pelatihan pembuatan daur ulang sampah.	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Sampah plastik berkurang dan memperoleh penghasilan dari daur ulang.	1M	APBD	Kelurahan terkait	DLH, CSR, Kecamatan, dan Masyarakat setempat	2020 – 2021

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
Pelatihan pengelolaan Bank Sampah	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya pendapatan msayarakat	2M	APBD	Kelurahan terkait	DISPERINDAKOP, DLH, CSR, Kecamatan, dan Masyarakat setempat.	2020 - 2021
Pengadaan Kantong belanja untuk masyarakat.	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Berkurangnya penggunaan kantong plastik.	500JT	APBD	Kelurahan terkait	CSR dan Distributor.	2020 - 2021
Penanaman pohon dan pembuatan sumur injeksi		Berkurangnya banjir dan tersedianya air permukaan.	1M	APBD	Kelurahan terkait, KSM	CSR dan DLH.	2021 – 2026
Menggalakan kegiatan *Car Free Day* dengan menambah titik lokasi dan	Program Peningkatan Keamanan	Polusi udara berkurang dan berkurangnya	720JT	APBD	Kecamatan.	CSR dan Masyarakat.	2020 - 2021

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
waktu.	Dan Kenyamanan Lingkungan	penggunaan BBM.					
Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah		Produksi sampah berkurang.	>1M	APBD dan APBN	PU dan Bapelitbang.	CSR dan Pemkot.	2021 - 2030
Penyediaan Fire Tag Boat		Minimnya kecelakaan atau kejadian yang berbahaya di laut	30M	APBN/APBD	Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Provinsi, dan Kementrian	2025 - 2029
Membuat peraturan tetang pembatasan penggunaan kerdaraan bermotor dibawah 1 Kilo.	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya lingkungan yang ramah dan berkurangnya tingkat kecelakaan	-	-	DISHUB	-	2020
Pengadaan transportasi massal dengan		Terwujudnya lingkungan yang	10M	APBD / APBN /	DISHUB	Swasta	2025 - 2029

Nama Kegiatan Smart City	Nomenklatur Program RPJMD	Indikator Keberhasilan (indicator output dari kegiatan)	Usulan Anggaran (rupiah)*	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Waktu Pelaksanaan
menggunakan tenaga listrik		ramah dan berkurangnya penggunaan SDA yang terbatas		SWASTA			
Pemasangan lampu solar cell dan LED jalan dan rumah tangga		Terwujudnya lingkungan yang ramah dan berkurangnya penggunaan SDA yang terbatas	2M	APBN/APBD	Dishub	-	2021-2024
Perbaikan insfrastruktur transportasi		Terwujudnya Transportasi yang memadai	2M	APBN/APBD	Dishub	-	2020
Pelatihan dan perekrutan tenaga pesisir sebagai tenaga penolong pertama	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Berkurangnya tingkat kecelakaan di laut	150jt	APBD	OPD Terkait	BNPB	2020

BAB VI
PENUTUP

Pemerintah Kota Bontang telah terpilih menjadi salah satu kota percontohan nasional dalam Gerakan Menuju 100 Smart City tahun 2020 – 2029. Gerakan yang diinisiasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini telah diikuti oleh 25 kota dan kabupaten pada tahun 2017, 50 kota dan kabupaten pada tahun 2018 serta 25 kota dan kabupaten pada tahun 2019. Kota Bontang telah terpilih oleh tim asesor menjadi bagian dari 25 kota dan kabupaten yang didampingi sebagai percontohan dalam perencanaan dan implementasi smart city tahun 2019. Gerakan Menuju 100 Smart City ini juga merupakan kegiatan bersama antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, Kemenpan-RB, Kemen PUPR, Bappenas, dan Kantor Staff Kepresidenan (KSP).

Konsep pembangunan *smart city*, dalam konteks Kota Bontang diadopsi menjadi Bontang *Smart City* atau Bontang Kota Pintar. Dengan tersusunnya "Masterplan atau Rencana Induk Pembanguna Kota Bontang Smart City 2020-2029", akan memberikan panduan bagi segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat Kota Bontang untuk bersama-sama dan saling bahu membahu mewujudkan Bontang *Smart City*.

Masterplan ini disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2020. Tujuannya agar bisa menjadi panduan atau arahan dalam mewujudkan pembangunan Bontang *Smart City* yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan dari program pembangunan *Smart City* ini, pemerintah Kota Bontang akan segera menerbitkan Peraturan Walikota atau bahkan jika memungkinkan diterbitkan Peraturan Daerah. Dengan demikian, visi pembangunan *Smart City* Kota Bontang 2020-2029 **"Mewujudkan Masyarakat Bontang Yang Sejahtera Dan Humanis Melalui Inovasi Yang Berkelanjutan**" benar-benar dapat diwujudkan dalam sepuluh tahun kedepan. Bertujuan agar seluruh elemen masyarakat Kota Bontang dapat merasakan perubahan positif akibat implementasi konsep *Smart City*.

Tentu saja dalam perjalanan sepuluh tahun kedepan, sangat dimungkinkan akan terjadi beberapa perubahan baik dari eksternal maupun internal. Dari eksternal misalnya terkait dengan perubahan kompatabilitas teknologi baik hardware maupun software, kebijakan pemerintah pusat, perilaku masyarakat dan lain-lain. Dari dalam misalnya struktur organisasi, RPJP, RPJMD dan lain-lain. Oleh karena itu dalam periode tertentu Masterplan Bontang Smart City 2020-2029 ini perlu dilakukan revisi agar dapat berakselerasi dengan perubahan yang ada.

Dengan menjalankan masterplan *Smart City* ini, teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi *enabler* yang memungkinkan untuk diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang efisien, bertanggungjawab, dan transparan serta pelayanan publik yang cepat dan mudah. Dengan praktik pemanfaatan teknologi akan meminimalkan kemungkinan kesalahan atau keterlambatan akibat kesalahan manusia atau *human error* dalam kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Harapan kedepan, penanganan

berbagai permasalahan birokrasi dan urusan masyarakat menjadi semakin lebih mudah, cepat, dan efisien.

Perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* ini akan merubah paradigma dari konsep kerja yang konvensional menjadi lebih berbasis teknologi sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik karena proses birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik, perbaikan infrastruktur dan prasarana untuk kenyamanan publik, serta peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Kota Bontang. Kerjasama antar instansi atau multi-sektor juga diperlukan untuk mensukseskan proses implementasi pembangunan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Bontang.

Buku II ini merupakan bagian inti dari *Guideline* Masterplan *Smart City* Kota Bontang. Arahan pembangunan *Smart City* ini masih terus dikembangkan dan diselaraskan dengan rencana-rencana pembangunan lain dalam agenda membangun Kota Bontang. Masterplan ini dihasilkan melalui analisis kondisi geografis, kesenjangan daerah, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bontang dan kemudian rangkuman dari dokumen perencanaan perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui dokumen RPJMD dan RPJPD Kota Bontang. Secara keseluruhan, pengembangan teknologi tidak akan menuai hasil maksimal jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang juga kompeten. Masterplan *Smart City* diharapkan dapat melengkapi dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan Kota Bontang kedepan.

Masterplan Smart City Kota Bontang 2020-2029

+62548-3030303
bontang@bontangkota.go.id
Jalan Moh. Roem No. 1, Bontang Lestari, Kota Bontang